



RENCANA INDUK PENGEMBANGAN POLITEKNIK NEGERI LHOKESEUMAWE TAHUN 2010 - 2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI LHOKESEUMAWE
2010



SAMBUTAN DIREKTUR

Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang berbasis keahlian dan keterampilan, keberadaan dan perannya sangat strategis dalam menghasilkan SDM yang mampu menggerakkan percepatan pembangunan ekonomi nasional yang pada gilirannya juga dapat meningkatkan daya saing bangsa. Mencermati hal ini, PNL perlu untuk melakukan re-orientasi dan reposisi dengan cara mengkaji kembali fungsi dan perannya dalam menjawab tantangan nasional maupun global. Oleh karenanya rencana-rencana strategis jangka panjang sangat penting untuk dirumuskan kembali dalam bentuk dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP).

Syukur Alhamdulillah, PNL telah selesai menyusun kembali Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka waktu 2010-2024, dimana dokumen ini menjadi acuan utama dalam menyusun Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Tahunan (RIT) PNL ke depan untuk meningkatkan peran lembaga dalam konteks persaingan global sehingga mampu memperkuat daya saing bangsa. Sangat disadari partisipasi PNL dalam peningkatan daya saing bangsa hanya dapat diberikan apabila kesehatan organisasi dapat diwujudkan melalui kemandirian dalam mengelola institusinya, memiliki visi-misi yang kuat, memiliki struktur dan manajemen yang efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan lulusan yang bermutu, mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan, melakukan pembaruan dalam proses perkembangan budaya bangsa dan kearifan lokal, serta mampu memberikan layanan yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penyusunan dokumen RIP ini diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang salah satu pilarnya adalah memperkuat kemampuan SDM dan iptek didalam koridor ekonomi. Strategi pengembangannya mengacu kepada rencana strategis Politeknik se Indonesia dan strategi jangka panjang Dikti yang tertuang dalam HELTS. Program pengembangan strategis yang menjadi fokus utama berorientasi pada; peningkatan kualitas, peningkatan produktifitas proses pendidikan dan pembelajaran yang relevan, peningkatan akses dan ekuitas dengan tetap memperhatikan tantangan kedepan menuju daya saing global.

Pada kesempatan ini, atas nama pimpinan PNL menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan dokumen ini. Akhirnya harapan kami semoga buku ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam membangun PNL dimasa depan.

Buketrata, Desember 2010

Direktur

Sebagai salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) perlu menentukan arah dan sasaran pengembangannya sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan bersama dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan (RIP). Penyusunan RIP PNL 2010-2024 merupakan hasil kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang kemudian dirumuskan oleh tim penyusun dengan menggunakan berbagai sumber informasi, referensi dan masukan-masukan dari berbagai kalangan terutama unsur pimpinan dan senat PNL.

Rencana Induk Pengembangan (RIP) ini memuat konsep dan kebijakan pengembangan PNL dalam kurun waktu 2010-2024, dimana dalam penyusunannya tetap mengacu kepada strategi jangka panjang dikti dan menyelaraskannya dengan program pembangunan nasional yang tertuang dalam konsep MP3EI dengan tidak melupakan kekhasan lokal. Strategi pengembangannya dibagi pada tiga tahap dengan masing-masing pentahapan diberi tema, yaitu; Tahap I (2010-2014) Penguatan Kapasitas Lembaga, Tahap II (2015-2019) Perluasan Akses Layanan, dan Tahap III (2020-2024) Daya saing Global. Tentunya semua kita berharap rencana pengembangan dimaksud akan berhasil dengan catatan PNL harus memiliki organisasi yang sehat, mandiri, dan mampu berinteraksi dengan baik untuk mendapatkan dukungan serta partisipasi aktif dari pemerintah, industri, dan masyarakat lainnya dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Ketua tim mengucapkan terima kasih kepada pimpinan PNL yang telah memberi kepercayaan kepada tim dalam penyusunan dokumen ini, juga kepada seluruh anggota tim dan narasumber lainnya yang telah turut membantu penyelesaian RIP ini, walaupun masih ada kelemahan dan ketidak sempurnaan yang kiranya menjadi langkah korektif dimasa mendatang. Terakhir diharapkan dokumen ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam menyusun program implementasi berkelanjutan bagi pembangunan PNL ke depan yang lebih kompetitif dan berdaya saing global.

Buketrata, Desember 2010

Ketua Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
 BAB II DASAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN	 5
2.1 Dasar Hukum	5
2.2 Visi dan Misi PNL	5
2.3 Peran dan Fungsi PNL	6
2.4 Tujuan	7
2.5 Asas Pengembangan	7
 BAB III ANALISA KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL	 9
3.1 Analisis Kondisi Internal	9
3.1.1 Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Sistem Tata Kelola Manajemen	9
3.1.1.1 Sistem Tata Kelola	9
3.1.1.2 Sistem Informasi	11
3.1.1.3 Sistem Penjaminan Mutu	12
3.1.1.4 Kinerja Program Studi	13
3.1.2 Perpustakaan	18
3.1.3 Peningkatan Relevansi	19
3.1.3.1 IPK Lulusan	19
3.1.3.2 Nilai TOEFL Lulusan	19
3.1.4 Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	20
3.1.4.1 Bidang Penelitian	20
3.1.4.2 Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	21
3.1.5 Kualitas Pembelajaran	22
3.1.6 Aset dan <i>Self Generating Revenue</i>	23
3.1.6.1 Anggaran Penyelenggaraan dan usaha Pendidikan Tinggi	24
3.1.6.2 Anggaran Administrasi Umum	25
3.1.6.3 Pendapata Negara Bukan Pajak	26
3.1.6.4 Pendapatan APB Aceh	26
3.2 Analisis Kondisi Eksternal	27
3.2.1 Tempat Kerja yang Prospek Bagi Lulusan	27
3.2.2 Pemerintah	28
3.2.3 Teknologi	28

BAB IV	KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWÉ	30
	2010 – 2024	
4.1	Arah Pengembangan PNL Periode I	31
4.2	Arah Pengembangan PNL Periode II	35
4.2.1	Program Kebijakan Penyelenggaraan Tridarma	37
4.2.2	Program Kebijakan Bidang kerjasama	43
4.2.3	Program Affiliasi Lainnya	47
4.3	Arah Pengembangan PNL Periode III	47
4.3.1	Kualitas dan Relevansi	48
4.3.2	Internasionalisasi Program Akademik	48
4.3.3	Persaingan Kualitas Global	49
4.3.4	Riset Kelas Dunia Berbasis keunggulan	50
4.3.5	Budaya Lokal dan Budaya Nasional dalam Keragaman Budaya Dunia	52
BAB V	POLA PENDANAAN	53
5.1	Pendanaan	53
5.2	Rencana Pengembangan Pendanaan	54
BAB VI	SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI	56
6.1	Landasan Hukum	56
6.2	Prinsip Pelaksanaan	57
6.3	Sistematika Pemantauan dan Evaluasi	57
6.4	Mekanisme Pelaksanaan	57
6.4.1	Pemantauan dan Evaluasi Eksternal	57
6.4.2	Pemantauan dan Evaluasi Internal	58
6.5	Indikator Kinerja	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Pertimbangan UJM-Monev terhadap pembukaan laboratorium baru	14
Tabel 3.2 Anggaran Penelitian dari Tahun 2006 – 2009	21
Tabel 3.3 Anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat dari Tahun 2006 – 2009	22
Tabel 3.4 Rekapitulasi Pencapaian Materi Kuliah	23
Tabel 5.1 Alokasi Pendanaan	53
Tabel 5.2 Pendanaan tahun 2010-2014	54
Tabel 5.3 Pendanaan tahun 2015-2019	55
Tabel 5.4 Pendanaan tahun 2020-2024	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Profil Status Akreditasi PNL Program D.III Dan Program D.IV	15
Gambar 3.2 Profil Rasio Jumlah Peminat Terhadap Kursi yang Tersedia Di PNL Melalui UMPL	16
Gambar 3.3 Profil Skor Hasil Ujian Mahasiswa Baru berdasarkan nilai Tertinggi dan Nilai Terendah	16
Gambar 3.4 Profil Mahasiswa per Tahun Angkatan berdasarkan Status Akademik	17
Gambar 3.5 Profil Staf Akademik Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
Gambar 3.6 Profil Perpustakaan Berdasarkan Jumlah Anggota dan Jumlah Peminjam	18
Gambar 3.7 Profil Jumlah Lulusan Berdasarkan Tahun Lulus Dan IPK	19
Gambar 3.8 Nilai rata-rata TOEFL dan TOEIC Mahasiswa Tahun 2007, 2008 dan 2009	20
Gambar 3.9 Profil Alokasi Anggaran Eks Proyek PNL	24
Gambar 3.10 Profil Alokasi Anggaran Administrasi Umum Berdasarkan Pos Pengeluaran	25
Gambar 3.11 Profil Besar Anggaran Administrasi Umum PNL Berdasarkan Sumbernya	25
Gambar 3.12 Profil Pendapatan Negara Bukan Pajak PNL Tahun 2006 - 2009	26
Gambar 3.13 Profil Penerimaan Anggaran Dari APBD Aceh Tahun 2006 – 2009	26
Gambar 4.1 Kerangka RIP PNL (<i>challenging, inspiring, encouraging</i>)	31
Gambar 4.2 Pendidikan Berwawasan Ekonomi	37
Gambar 5.1 Alokasi Anggaran	54



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar penting yang diharapkan dapat membawa perubahan suatu bangsa. Dunia pendidikan tinggi tidak hanya dapat menjadi sarana bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi proses pembelajaran di kampus juga diharapkan dapat menjadi wahana yang sangat penting untuk merubah pola pikir masyarakat dalam menuju terwujudnya masyarakat sipil (*civil society*) yang demokratis. Namun demikian, timbul pertanyaan, apakah pendidikan tinggi di Indonesia sudah mampu menunjukkan jati diri seperti yang diharapkan?

Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek nasional, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat; meningkatkan komitmen bangsa terhadap pengembangan iptek; mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan iptek.

Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk (a) mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri; (c) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan.

Sejarah berdirinya Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) tidak dapat dipisahkan dari peran Universitas Syiah Kuala sebagai induk dan cikal bakal lahirnya Politeknik Negeri Lhokseumawe. Politeknik Negeri Lhokseumawe merupakan satu-satunya Politeknik Negeri yang berada di Provinsi Aceh. Gedung dan fasilitas didirikan pada tahun 1985 dengan bantuan dana dari Bank Dunia XIII dan mulai menyelenggarakan pendidikan sejak tanggal 5 Oktober 1987 dengan nama



Politeknik Universitas Syiah Kuala. Politeknik Negeri Lhokseumawe mengalami transformasi dari Politeknik Universitas Syiah Kuala Menjadi Politeknik Negeri Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud No. 100/0/1997 Tanggal 9 Mei 1997.

Saat pendirian pada tahun 1987, Politeknik memiliki tiga jurusan yang terdiri dari jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin dan Teknik Kimia. Namun seiring dengan tuntutan dan perubahan paradigma pendidikan tinggi yang disertai kebutuhan pasar kerja PNL hingga saat ini telah mempunyai 5 Jurusan yang terdiri dari 10 program studi D3 dan 3 Program Studi D4 dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 273, tenaga teknis 76 dan tenaga administrasi 83 orang. Meskipun baru saja melewati usia 20 tahun PNL telah meluluskan lulusan sebanyak 5.362 orang dari lima Jurusan atau program studi. Lulusan yang telah dihasilkan oleh PNL merupakan tenaga terampil yang memiliki kompetensi dibidangnya. Lulusan tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia maupun luar negeri.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang memuat salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Perguruan Tinggi merupakan salah satu sarana utama dalam mewujudkan tujuan Negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Tujuan yang tertuang dalam konstitusi Negara tersebut menjadi sumber inspirasi bagi seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk terus mengantisipasi gelombang perubahan yang terjadi. Dalam hal ini kerjasama pemerintah dan pihak penyelenggara pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan atmosfir yang sehat dan berkualitas, sehingga tujuan Negara membangun pendidikan dapat dicapai secara maksimal.

Pembangunan pendidikan yang mengacu pada visi maupun misi pendidikan nasional merupakan acuan yang tepat untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dengan kapasitas yang handal dalam mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan yang mencakup tiga hal yaitu:

1. Afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul dan kompetensi estetis;
2. Kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.

Dalam rangka mempertahankan serta mewujudkan tujuan lembaga maka PNL perlu membentuk sebuah format RIP yang terarah, informatif, dan spesifik untuk kurun waktu 15 (lima belas) tahun ke depan yaitu periode 2010-2024. Penyusunan RIP ini akan dijadikan sebagai penentu arah dan kebijakan PNL dalam pengambilan keputusan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dengan keterkaitan seluruh komponen baik finansial maupun non-finansial yang bersinergi dalam setiap implementasi keputusan.



Memperhatikan pentingnya RIP bagi sebuah Perguruan Tinggi khususnya PNL, maka perlu ditetapkan beberapa faktor yang merupakan dasar acuan dalam merumuskan rencana ke depan, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Dasar, berhubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program ini meliputi pengembangan sistem informasi manajemen, relevansi dan efisiensi akademik, kualitas dan daya saing. Kapasitas dan manajemen laboratorium, dan peningkatan akreditasi.
2. Program Pengembangan kapasitas dan akses lembaga yang meliputi *Carier Development Center* (Pusat Pengembangan Karir), program sertifikasi DI dan pengembangan program studi D3 dan D4.
3. Program Interkoneksi, dengan mengacu pada perkembangan teknologi komunikasi dan jaringan dalam bentuk *Link and Network* serta *Sandwich Program (industrial based practical)*.
4. Pengembangan Area dan Infrastruktur, yang mencakup pengembangan lahan, gedung dan perumahan dengan konsep yang merujuk pada rencana induk tata kota (*urban planning/planology*).

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RIP Politeknik Negeri Lhokseumawe dimaksudkan sebagai acuan dalam penentuan arah dan kebijakan dalam pengambilan keputusan yang meliputi baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Melalui RIP diharapkan kematangan berpikir dan antisipasi pada perubahan dapat ditingkatkan secara signifikan sehingga akan tercipta atmosfer yang sehat antar lembaga. RIP dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja lembaga dengan berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas maupun efisiensi.

Sejalan dengan maksud di atas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan RIP ini, pada dasarnya meliputi beberapa hal berikut, yaitu:

1. Mendapatkan kerangka dan arah pengembangan PNL dalam jangka waktu 2010-2024.
2. Menentukan arah dan kebijakan PNL dalam jangka waktu 2010-2024.
3. Menyesuaikan arah dan kebijakan pengembangan PNL dengan visi dan misi.
4. Pencapaian tujuan PNL secara keseluruhan yang terstruktur dan sistematis.
5. Kerangka evaluasi implementasi program terhadap pencapaian tujuan PNL dalam periode lima belas tahun.
6. Sebagai dasar penyusunan RIP selanjutnya.

Perekonomian yang didasarkan pada penciptaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara kreatif dan inovatif, disebut *knowledge based economy*. Pada masa yang akan datang, kemampuan bersaing di bidang ekonomi akan ditentukan oleh kemampuan suatu bangsa dalam penciptaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan [Porter, 2002], teknologi, dan seni. Dengan membangun kemampuan tersebut pada tingkat yang memadai, maka suatu bangsa dapat bersaing dan bersanding sepadan dengan bangsa lain di dunia.



Karena itu, melalui penelitian yang gayut dengan kebutuhan bangsa baik sekarang maupun di masa yang akan datang, perguruan tinggi berpeluang untuk berperan dalam meningkatkan kemampuan bangsa bersaing dalam *knowledge based economy*. Di samping itu, persaingan SDM di pasar kerja nasional maupun internasional terus menuntut tingkat profesionalisme (*knowledge, hard skills* dan *soft skills*) yang semakin tinggi pula. Hal tersebut menuntut peningkatan kualitas lulusan pendidikan tinggi di Indonesia.

Persaingan antar lulusan perguruan tinggi akan menjadi lebih ketat di kemudian hari dengan adanya kebijakan pasar terbuka yang mendorong perusahaan multi nasional mensyaratkan sertifikasi profesi bagi pekerjanya. Model ketrampilan bekerja yang distandardisasi secara internasional menuntut pihak di luar perguruan tinggi, seperti industri dan asosiasi profesi untuk bersama-sama merumuskan model sertifikasi profesi yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Pada saat ini beberapa bidang profesi, misalnya profesi perencana bangunan (sipil, arsitektur, desain interior, profesi kedokteran, apoteker, pengacara atau akuntan) telah mulai melakukan sertifikasi dengan pengakuan cukup baik di tingkat nasional.

Di sisi lain, kebijakan pasar terbuka memberi peluang bagi lulusan perguruan tinggi Indonesia untuk turut memasuki pasar kerja dunia. Sebaliknya, lulusan perguruan tinggi luar negeri juga memiliki peluang yang sama untuk memasuki pasar kerja dalam negeri. Hal ini menuntut lulusan perguruan tinggi Indonesia harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri terhadap persyaratan peluang-peluang yang ada. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengadopsi dan mengadaptasi sistem serta metode pendidikan baru, khususnya yang berbasis teknologi informasi perlu dikembangkan oleh perguruan tinggi Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah meningkatkan kemampuan generik serta *soft skill* (komunikasi, etika, *problem solving, critical thinking, team work*, dan lain-lain).

Langkah signifikan yang diperlukan untuk menetapkan visi dan misi serta arah pengembangannya, adalah dengan cara meningkatkan kemampuan mengidentifikasi potensi khas dan unggul yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi. Selanjutnya, kekhasan dan keunggulan tersebut dirumuskan dan dikembangkan dalam sasaran yang realistis dan berkelanjutan.



BAB 2

DASAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

2.1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik Negeri Lhokseumawe mangacu pada:

1. UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 tentang Pendidikan
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
6. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2000, tentang Pendirian Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2005-2025.

2.2. Visi dan Misi PNL

2.2.1 Visi PNL

Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang mandiri dan unggul di tingkat global pada Tahun 2024.

2.2.2 Misi PNL

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi secara mandiri dengan penguatan *soft skill*
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berorientasi teknologi inovatif
3. Aktif merespon isu global dalam upaya peningkatan kapasitas lembaga dan akses layanan dengan memperhatikan kearifan lokal



2.3. Peran dan Fungsi PNL

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin pesat menuntut pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih tepat, cepat, dan cermat serta bertanggung jawab agar mampu memacu pembangunan. Peran Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional (vokasi) pada masa datang tidak lagi sekedar menghasilkan tenaga profesional untuk mengisi kesenjangan tenaga kerja antara lulusan sekolah menengah dengan tenaga sarjana. Namun, politeknik mau tidak mau harus lebih tanggap, lebih terampil, dan lebih profesional lagi dalam hal pengelolaan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing agar dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja dan *stakeholder*.

Melihat peran yang akan diemban PNL sebagai penyelenggara pendidikan tinggi profesional di masa mendatang, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku maka tugas dan kewajiban PNL dapat dijabarkan melalui fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan profesional dalam berbagai bidang pengetahuan.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terapan dalam rangka pengembangan profesionalisme.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.

Terkait dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan HELTS (*Higher Education Long Term Strategy*) 2003-2010 dengan tantangan yang dihadapi lebih berat, luas dan kompleks, sekaligus menegaskan kiprahnya di tingkat internasional, maka di masa depan PNL diharapkan mampu menciptakan pola pikir dan paradigma baru, dalam hal pengembangan pendidikan profesional di Indonesia maupun regional. Perlunya peningkatan daya saing, tuntutan otonomi dan desentralisasi, dan pentingnya kesehatan organisasi yang merupakan tiga pilar utama HELTS 2003-2010. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan kinerja agar PNL mampu bersaing pada tingkat nasional maupun regional, maka dalam hal ini peran/ fungsi PNL adalah sebagai berikut.

1. Sebagai wahana untuk menghasilkan SDM yang memiliki kualifikasi tertentu agar dapat berfungsi secara produktif dan dapat mengembangkan diri di masyarakat.
2. Sebagai wahana penyelenggaraan proses belajar mengajar yang mengacu pada pengembangan keahlian dan ketrampilan.
3. Sebagai wadah pengembangan SDM berkualitas yang menitikberatkan pada pengembangan jiwa entrepreneurship dan ekonomi kreatif.
4. Sebagai pusat penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi terapan.
5. Sebagai lembaga uji kompetensi keahlian dan sertifikasi pada bidang teknik dan ekonomi.
6. Berperan aktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional secara berkesinambungan.



2.4. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL), berdasarkan Statuta, yaitu:

1. Menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan vokasi sejumlah program studi dengan berlandaskan pada kompetensi profesi setiap bidang yang terpilih, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang siap berprofesi dalam bidang masing-masing dengan kompetensi yang tinggi menurut standar nasional dan internasional.
3. Membina budaya kewirausahaan di lingkungan civitas akademika Politeknik, yang dapat menumbuhkan industri kecil dan menengah baru karena kemitraan atau oleh lulusan Politeknik.
4. Menjadi wahana pengembangan dan implementasi IPTEK baru melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, khususnya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan meningkatkan relevansi pendidikan.

Selanjutnya sesuai dengan konsep dan tujuan dasar pendidikan tinggi, maka PNL memiliki tujuan, yaitu:

- 1) Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang vokasi berstandar kompetensi nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- 3) Menjadi pusat pengembangan kompetensi vokasi yang bersertifikasi nasional dan internasional.
- 4) Menghasilkan penelitian terapan dan implementasi IPTEKS untuk peningkatan kualitas masyarakat.
- 5) Menjadi pusat layanan bagi *stakeholders* yang bermutu dan efisien

2.5. Asas Pengembangan

Berdasarkan kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional yang telah dirumuskan oleh departemen pendidikan nasional, maka ada beberapa aspek dasar yang harus diperhatikan dalam pengembangan pendidikan tinggi, yaitu peningkatan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Untuk program peningkatan pemerataan diarahkan pada peningkatan daya tampung PNL. Untuk relevansi pendidikan dilakukan pengembangan program studi sesuai dengan arah pembangunan nasional dan daerah, tantangan globalisasi, dan kebutuhan pasar kerja. Peningkatan mutu/kualitas diarahkan pada peningkatan kualitas calon mahasiswa, kualitas dan kuantitas staf pengajar, staf administratif, staf teknis, dan fasilitas penunjang akademik dan peningkatan proses belajar mengajar (PBM). Kemudian untuk peningkatan tata kelola atau efisiensi diterapkan melalui pemberdayaan sumber daya yang dimiliki serta optimalisasi pemanfaatannya, untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan dan pendidikan, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan program studi mereka tepat waktu



dengan prestasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut di atas serta mengacu kepada Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang dan memperhatikan visi dan misi PNL di depan, maka PNL menetapkan azas atau prinsip dasar pengembangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kinerja lembaga PNL sehingga mampu menarik minat para calon mahasiswa baru, dunia usaha dan industri, untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas lulusan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas staf pengajar melalui program lanjutan S2 dan S3, serta berbagai program pemberdayaan staf pengajar untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan kemahasiswaan, dan pengembangan profesionalisme pengelolaan lembaga untuk tercapainya tujuan dasar pembangunan pendidikan (pemerataan, mutu, relevansi dan efisiensi).
3. Melakukan pengembangan program studi untuk meningkatkan relevansi dengan kebutuhan dunia kerja, pembangunan daerah, nasional, dan era globalisasi.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana PNL, yang meliputi perluasan lahan, fasilitas gedung, serta perumahan, sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung pelaksanaan pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas lulusan, relevansi program, dan efisiensi pengelolaan.
5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait baik swasta maupun lembaga pemerintah. Khusus untuk pengembangan program studi baru akan kerjasama dengan perguruan tinggi lain dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM staf dan kualitas lulusan.
6. Meningkatkan mutu dan kinerja lembaga PNL melalui proses monitoring dan evaluasi, akreditasi program studi dan lembaga serta penjaminan mutu. Disamping itu juga perlu dilakukan peningkatan kerjasama antar lembaga dan koordinasi untuk mewujudkan sinkronisasi antar unit dalam lembaga PNL.
7. Meningkatkan kemampuan pendanaan lembaga sebagai wujud kemandirian.



BAB 3

ANALISA KONDISI INTERNAL DAN EKTERNAL

3.1. ANALISIS KONDISI INTERNAL

Sebagai bahan pertimbangan penyusunan RIP agar maksud dan tujuan sebagai tindak lanjut kedepan dapat sesuai dengan arahan serta tuntutan RIP berdasarkan tahapan-tahapan yang telah gariskan/disusun, maka perlu kiranya menganalisis berupa evaluasi diri tentang kondisi, baik internal maupun eksternal saat ini dan selanjutnya menjadikan indikator kekuatan dan kelemahan Politeknik Negeri Lhokseumawe untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Evaluasi diri ini menggunakan data dan informasi selama 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2006 sampai tahun 2009, sedangkan sumbernya baik telah diolah maupun data mentah diperoleh langsung dari bagian-bagian dan unit-unit yang berkompeten dan berwenang terhadap informasi tersebut.

3.1.1 Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Sistem Tata Kelola Manajemen

Pada butir 2 asas atau prinsip dasar pengembangan Politeknik Negeri Lhokseumawe adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas staf pengajar melalui program lanjutan Strata 2 dan Strata 3 serta berbagai program pemberdayaan staf pengajar untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengembangan profesionalisme pengelolaan lembaga untuk tercapainya tujuan dasar pembangunan pendidikan (pemerataan, mutu, relevansi dan efisiensi), sehingga mampu menarik minat para calon mahasiswa baru, dunia usaha dan industri untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas lulusan melalui kemampuan pendanaan lembaga yang mengarah kepada pencapaian Badan Hukum Pendidikan (BHP) sebagai wujud kemandirian lembaga Politeknik Negeri Lhokseumawe. Rencana yang telah di susun tentu saja tidak serta merta akan terwujud, semua ini harus melalui tahapan demi tahapan sesuai dengan skala prioritas. Berdasarkan hasil evaluasi diri dibawah ini beberapa rencana yang penting dilakukan pada tahap awal untuk mencapai target adalah pengembangan sistem pelayanan prima melalui sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan akhirnya melahirkan tertib administrasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3.1.1.1 Sistem Tata Kelola

Penyelenggaraan sistem kelola di Politeknik Negeri Lhokseumawe masih menggunakan sistem *sentralisasi* dengan struktur hirarki yang panjang. Tentu saja dalam implementasinya cenderung berbentuk birokrasi dan mengakibatkan kurang efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi masih kurang tertata dengan baik (tidak terkomputerisasi), sulitnya mendapatkan data serta informasi secara cepat dan konsisten. Seringnya terjadi kesalahan komunikasi, tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Fenomena ini dapat dilihat pada hal-hal berikut ini:



-
1. Informasi dan data yang dihasilkan atau dilaporkan oleh unit kerja dan institusi tidak konsisten satu dengan lainnya.
 2. Pelacakan informasi yang seharusnya menjadi konsumsi publik masih sulit dilakukan karena masih dalam isolasi dan cenderung bersifat rahasia.
 3. Hubungan tata kelola antara unit kerja yang didasari atas pemakaian bersama (*sharing*) dan pertukaran (*exchange*) informasi belum diimplementasikan.
 4. Manajemen staf yang tidak profesional dengan menempatkan orang tidak pada tempatnya (*the right man on the right place and the right job*) masih terus berlanjut tanpa reformasi secara total.

Selain itu, skill dan disiplin sebagian staf administrasi masih rendah. Salah satu indikator pengukuran dapat digunakan adalah seringnya terjadi kelambatan cenderung kurangnya respon dalam memproses suatu pekerjaan, tingkat kehadiran yang masih rendah (tidak tepat waktu) hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil rekaman absen elektronik. Demikian halnya dengan tingkat kehadiran dosen pada pelaksanaan perkuliahan, kehadiran teknisi pada pelaksanaan kuliah di laboratorium dan kehadiran mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi unit jaminan mutu menyimpulkan bahwa secara rata-rata dari 17 program studi yang ada menunjukkan angka sebesar 93%. Persentase ini masih dibarengi dengan catatan yaitu terdapat 2 program studi atau 11,75% tingkat kehadiran dosen di bawah 80% dan 1 program studi atau 5,88% pencapaian tingkat kehadiran dosen sebesar 100%. Selanjutnya tingkat kehadiran teknisi pada pelaksanaan perkuliahan di laboratorium secara rata-rata sebesar 97%. Angka ini juga dengan catatan berupa hanya 4 program studi atau 24,53% dari seluruh program studi yang melaporkan hasil evaluasi terhadap kehadiran teknisi.

Demikian juga terhadap kehadiran mahasiswa, hasil monitoring dan evaluasi tahun 2009 secara keseluruhan program studi dinyatakan relative baik dengan rata-rata pencapaian tingkat kehadiran mahasiswa sebesar 95,1%.

Pemanfaatan fasilitas dan asset juga belum optimal dan belum efisien. Data base peralatan belum ada mengakibatkan sulitnya informasi tentang kondisi peralatan saat ini. Rasio persentase peralatan yang baik dan rusak belum tersedia. Situasi seperti ini tentu akan menyebabkan potensi penggalan dana dari asset yang ada tidak dapat dioptimalkan. Manajemen sumber daya manusia belum mampu menciptakan atmosfir kerja yang produktif salah satu faktor penyebabnya adalah tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Perbaikan bidang manajemen institusi merupakan salah satu fokus perbaikan yang harus ditetapkan Pimpinan Politeknik, sistem tata kelola yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya *Good and Clean Governance* dalam kegiatan operasi.

Politeknik Negeri Lhokseumawe menyadari segala kekurangan dalam sistem tata kelola selama ini. Sebagai perguruan tinggi yang sedang menyiapkan diri menjadi lembaga yang mandiri dan mengarah kepada pencapaian Badan Hukum Pendidikan (BHP), lembaga ini terus meningkatkan kemampuan bidang pendanaan.

Kerangka pengembangan Politeknik Negeri Lhokseumawe kedepan telah menetapkan azas atau prinsip dasar pengembangan, yaitu:



1. Meningkatkan kemampuan kinerja lembaga PNL, sehingga mampu menarik minat para calon mahasiswa baru, dunia usaha dan industry untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas lulusan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas staf pengajar melalui program lanjutan S2 dan S3, serta berbagai program pemberdayaan staf pengajar untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan kemahasiswaan dan pengembangan profesionalisme pengelolaan lembaga untuk tercapainya tujuan dasar pembangunan pendidikan (pemerataan, mutu, relevansi dan efisiensi).
3. Melakukan pengembangan program studi untuk meningkatkan relevansi dengan kebutuhan dunia kerja, pembangunan daerah, nasional dan era globalisasi.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana PNL yang meliputi perluasan lahan, fasilitas gedung serta perumahan sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung pelaksanaan pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas lulusan, relevansi program dan efisiensi pengelolaan.
5. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait baik swasta maupun lembaga pemerintah. Khusus untuk pengembangan program studi baru akan bekerjasama dengan perguruan lain dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM staf dan kualitas lulusan.
6. Meningkatkan mutu dan kinerja lembaga PNL melalui proses monitoring dan evaluasi, akreditasi program studi dan lembaga serta penjaminan mutu. Disamping itu juga perlu dilakukan peningkatan kerjasama antar lembaga dan koordinasi untuk mewujudkan sinkronisasi antar unit dalam lembaga PNL.
7. Meningkatkan kemampuan pendanaan lembaga yang mengarah kepada pencapaian Badan Hukum Pendidikan (BHP) sebagai wujud kemandirian lembaga PNL.

Seluruh azas atau prinsip dasar pengembangan yang ditetapkan oleh lembaga PNL yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2009 tersebut haruslah membutuhkan : (a) komitmen dari pengambil keputusan, (b) perubahan paradigma, (c) sumber daya manusia dan (d) sumber dana. Prasyarat ini harus berjalan dengan sinergis sehingga perubahan sistem tata kelola Politeknik Negeri Lhokseumawe dapat berlangsung dengan baik, dengan demikian kemandirian lembaga Politeknik Negeri Lhokseumawe bisa terwujud serta tercapainya Badan Hukum Pendidikan (BHP).

3.1.1.2 Sistem Informasi

Pengelolaan sistem informasi di Politeknik Negeri Lhokseumawe telah dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hingga akhir tahun 2009 Unit kerja yang terkait langsung dalam pengelolaan adalah UPT. Komputer dan bagian Sistem Informasi dibawah bagian akademik dan kemahasiswaan yaitu sub. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi (PSI). Peran UPT. Komputer adalah memberikan pelayanan teknis bidang teknologi komputer dan Sistem Informasi, sedangkan sub. Bagian Sistem Informasi lebih mengarah pada pengelolaan dan penyediaan informasi untuk kebutuhan civitas akademik dan *stakeholders*. Kapasitas bandwidth internet Politeknik Negeri Lhokseumawe sekarang ini adalah *downlink*



2048 kbps sedangkan bandwidth uplink adalah 512 kbps. Jumlah user yang online untuk kondisi sekarang ini pada saat bersamaan rata-rata setiap hari adalah 150 *user*. Sedangkan jumlah user yang sudah terdaftar pada server sekarang ini adalah 1.504 *user*. Dan rata-rata user baru yang mendaftar di UPT Komputer dalam seminggu minimal 3 *user*.

Untuk memaksimalkan koneksi internet seperti yang diinginkan diperlukan ketersediaan *resource bandwidth* dalam jaringan sesuai dengan jumlah *user* yang memakai internet. Infrastruktur jaringan wireless dan kabel yang ada saat ini telah cukup memadai, namun dengan semakin banyaknya *user* yang menggunakan jaringan dan adanya pengembangan Database terintegrasi diperlukan jaringan yang stabil dan cepat dalam proses transfer data. Teknologi jaringan wireless dan jaringan kabel yang digunakan sekarang dengan kondisi geografis kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe yang mempunyai gedung terpisah dan banyak pohon, sehingga penggunaan jaringan *wireless* atau kabel fungsinya tidak maksimal. Ke depannya, UPT. Komputer akan memakai jaringan *fiber optik*. *Fiber optic* menggunakan cahaya sebagai pembawa informasi dan dapat memperbesar kapasitas volume informasi yang akan di bawa, jaringannya kebal elektromagnetik dan intervensi radio, bisa dipasang ditempat yang sulit (misalnya di sela-sela gedung besar, tempat yang memiliki potensial ledakan seperti wilayah yang bergas), *Fiber Optic* juga unggul dalam menyimpan data, sulit untuk disadap, dan informasi pun dapat disiarkan tanpa di ulang. Pemasangan *fiber optic* direncanakan di seluruh area kampus terutama untuk jurusan-jurusan, Kantor Pusat Administrasi, asrama mahasiswa putra dan putri serta komplek perumahan dosen.

Sumber daya UPT. Komputer memiliki 6 staf dengan perincian seorang kepala, seorang wakil kepala dan 2 staf administrasi ditambah 2 tenaga dosen yang diperbantukan. Adapun klasifikasi pendidikan adalah 3 staf telah berkualifikasi pasca sarjana dibidang komputer, 1 staf masih kualifikasi sarjana dibidang komputer dan 2 staf sebagai tenaga administrasi.

3.1.1.3 Sistem Penjaminan Mutu

Sampai tahun 2009, proses penjaminan mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe dilakukan seluruhnya oleh Tim Unit Monitoring dan Evaluasi internal. Tugas pokok dan fungsi unit jaminan mutu telah diberikan kewenangan seluas-luasnya termasuk mempersiapkan standar mutu baru dan memberikan rekomendasi atau aksi korektif yang mengikat. Secara spesifik tujuan umum dari Sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi adalah kegiatan mandiri perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak luar perguruan tinggi. Tujuan khususnya adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*) yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Unit Jaminan Mutu-Monev akan dievaluasi oleh pihak eksternal yaitu Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Program Monitoring dan Evaluasi Jaminan Mutu saat ini adalah memonitor tentang:

1. Kehadiran mahasiswa.
2. Kehadiran dosen.
3. Materi kuliah.



Pelaksanaannya mencakup:

1. Kesesuaian dengan kebijakan penjaminan mutu unit pengelola.
2. Sistem dokumentasi
3. Tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan.

Selama tahun 2009 unit Jaminan Mutu telah memonitoring dan mengevaluasi tentang:

1. Monitoring dan evaluasi kehadiran dosen/teknisi dan mahasiswa.
2. Evaluasi pencapaian target silabus pembelajaran.
3. Kajian akademik monev terhadap program studi Teknik Instrumentasi dan Otomasi Industri.
4. Kajian akademik rencana pembukaan laboratorium
5. Laporan Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Untuk lebih meningkatkan kinerja dan memperkuat posisi UJM-MONEV, pada tanggal 5 Mei 2009 Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe telah mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) Satuan Unit Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe. Seluruh anggotanya berasal dari masing-masing program studi dengan tugas utama adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kendali mutu serta melaporkan hasil evaluasi GKM ke Direktur secara tertulis.

3.1.1.4 Kinerja Program Studi

Selama tahun 2009 tim Monev Politeknik telah melakukan evaluasi kinerja untuk masing-masing program studi. Disamping kehadiran dosen, teknisi dan mahasiswa, UJM-Monev PNL melakukan monitoring terhadap: (a) evaluasi pencapaian target silabus pembelajaran, (b) kajian khusus terhadap program studi Teknik Instrumentasi dan Otomasi Industri dan (c) kajian akademik rencana pembukaan laboratorium.

Metode yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi adalah dengan pendekatan *Plan-do-check-Action* (PDCA). Secara umum tujuannya adalah: (1) untuk mengevaluasi pelaksanaan/pencapaian mutu terhadap butir-butir pelaksanaan kendali mutu yang sudah ditetapkan, sehingga diketahui sisi lemah dari penyelenggaraan pendidikan secara internal PNL. (2) menjadikan data hasil evaluasi sebagai stimulus perbaikan kinerja satuan unit kerja jurusan di masa mendatang sehingga dapat meningkatkan mutu PNL dalam sistem penjaminan mutu.

Tahapan pelaksanaan kegiatan evaluasi pelaksanaan kendali mutu adalah:

1. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi dibantu oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) satuan unit kerja tingkat jurusan terdiri dari unsure pimpinan dan dosen.
2. Mendistribusikan form laporan absensi dosen dan mahasiswa.
3. Mendistribusikan form laporan pencapaian materi kuliah.
4. Monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa dan dosen, pencapaian materi kuliah dan borang evaluasi GKM.

Hasil dari evaluasi dituangkan dalam dokumen laporan Monitoring dan Evaluasi tiap akhir tahun sebagai pertanggung jawaban tim Monev-UJM.

Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring terhadap pencapaian target silabus pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut:



- (1) Rata-rata pencapaian target silabus materi kuliah pada semester genap tahun 2009 sebesar 92,7%, sedangkan target silabus tidak tercapai sebesar 7,3%.
- (2) Jumlah pertemuan keseluruhan untuk mencapai 100% target silabus tersebut adalah 6.073 kali pertemuan kuliah, namun yang terpenuhi hanya 5.412 kali pertemuan dan sisanya 661 kali pertemuan berstatus tidak terlaksana.

Hasil evaluasi terhadap program studi Teknik Instrumentasi dan Otomasi Industri dengan analisis SWOT tim UJM-Monev memberi rekomendasi bahwa Program Studi Instrumentasi dan Otomasi dan Industri Teknik Elektro **harus tetap dipertahankan (tetap buka)** dengan beberapa catatan.

Rencana pembukaan Program Studi D.III Mesin Industri jurusan Teknik Mesin, berdasarkan tinjauan elemen identitas program studi dan kesiapan dasar Jurusan Teknik Mesin, tim UJM-Monev memberi rekomendasi bahwa Program Studi D.III Mesin Industri layak untuk dibuka di Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Pertimbangan pembukaan laboratorium baru berdasarkan hasil visitasi uji kelayakan dan data-data evaluasi yang dilakukan UJM-Monev, maka pertimbangan tim UJM-Monev ditunjukkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Pertimbangan UJM-Monev terhadap pembukaan laboratorium baru

No	Nama Laboratorium yang diusulkan	Jurusan	Pertimbangan UJM-Monev
1	Pengelasan dan Pabrikasi Logam	Teknik Mesin	Usul pembukaan laboratorium layak dipertimbangkan, untuk kestabilan dan keefektifan proses praktikum mahasiswa.
2	Mekatronika dan Otomasi	Teknik Mesin	Usul pembukaan laboratorium layak dipertimbangkan untuk pengembangan program studi ke depan.
3	Elektroplating	Teknik Mesin	Usul pembukaan laboratorium dapat dipertimbangkan untuk tahun berikutnya.
4	Fluida	Teknik Mesin	Usul pembukaan laboratorium belum layak dipertimbangkan.
5	Hidro	Teknik Sipil	Usul pembukaan laboratorium layak dipertimbangkan.
6	Geodesi	Teknik Sipil	Usul pembukaan laboratorium layak dipertimbangkan.

(sumber : UJM-Monev, 2009)

Secara keseluruhan hasil pertimbangan terhadap pembukaan laboratorium di Politeknik Negeri Lhokseumawe adalah layak, namun laboratorium Fluida Teknik Mesin belum layak

dipertimbangkan karena belum ditemukan adanya kendala pada proses belajar mengajar yang berarti selama ini.

Dalam perjalanannya melakukan evaluasi kinerja program studi, tim UJM-Monev masih saja menemukan hambatan-hambatan, seperti: (1) tidak semua dosen mengisi materi kuliah setelah melaksanakan perkuliahan, (2) proses pengisian data sebagian dari anggota Gugus Kendali Mutu tingkat jurusan tidak tepat waktu, (3) *collecting* data belum terintegrasi dengan jaringan. Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi hasil evaluasi tersebut.

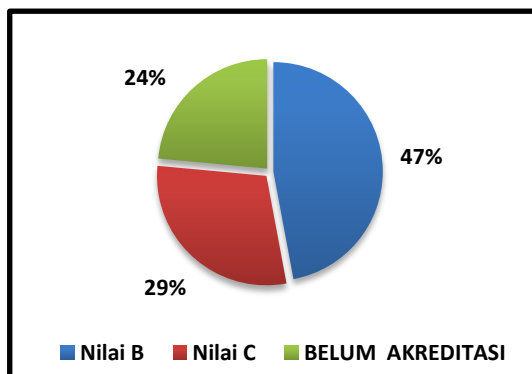
Tantangan ke depan Politeknik Negeri Lhokseumawe adalah bagaimana mengantisipasi timbulnya segala hambatan-hambatan yang terjadi secara keseluruhan.

3.1.1.5. Akreditasi Program Studi

Saat ini Politeknik Negeri Lhokseumawe memiliki 17 program studi reguler, yang terdiri dari 11 program studi Diploma tiga (D.III) dan 6 program studi Diploma empat (D.IV). Empat program studi (24%) statusnya belum terakreditasi dan 13 program studi atau 76% telah terakreditasi.

Peningkatan nilai akreditasi terhadap 5 program studi atau 29% dengan nilai C dan 8 program studi atau 47% dengan nilai B ke peringkat lebih baik lagi merupakan tantangan Politeknik Negeri Lhokseumawe di masa yang akan datang. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada daftar lampiran.

Gambar 3.1
Profil Status Akreditasi Politeknik
Negeri Lhokseumawe Program D.III
dan Program D.IV
(sumber : PSI, 2009)



3.1.2 Evaluasi Kinerja dan Pengelolaan Program Peningkatan Mutu, Efisiensi dan Relevansi Akademik

3.1.2.1 Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas

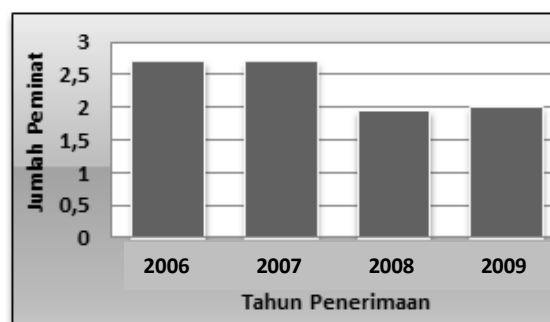
Penilaian efisiensi dan produktivitas bidang akademik dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya tata kelola lembaga, mutu dosen, sarana dan prasarana, rasio dosen terhadap mahasiswa, fasilitas pendukung lainnya, tingkat kelulusan dan kualitas mahasiswa baru. Apabila input penerimaan mahasiswa telah baik, proses belajar mengajar berjalan tanpa hambatan maka diharapkan lulusan akan mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, baik di tingkat regional maupun nasional bahkan internasional.

Faktor yang mempengaruhi peningkatan efisiensi dan produktivitas dengan beberapa analisis dapat diuraikan di bawah ini:

a. Mahasiswa Baru

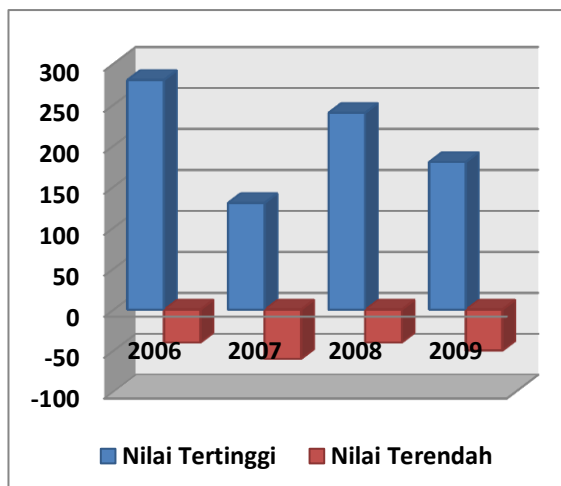
Tingkat persaingan mahasiswa baru Politeknik Negeri Lhokseumawe (rasio antara peminat dengan yang diterima) selama 4 tahun terakhir cenderung sama. Dari jumlah calon yang mendaftar rata-rata tingkat persaingan relatif kecil dengan rasio 1 : 2 (Gambar 3.2). Sementara program sosialisasi Politeknik ke seluruh daerah-daerah dalam provinsi Aceh telah dilakukan secara rutin setiap tahunnya, ternyata masih tidak efektif. Demikian dengan program-program bantuan bea siswa dirasa masih kurang besar pengaruhnya terhadap calon mahasiswa baru.

Gambar 3.2
Profil Rasio Jumlah Peminat
Terhadap Kursi yang Tersedia
Di Politeknik Negeri Lhokseumawe
Melalui UMPL
(sumber : PSI, 2009)



Tingkat persaingan berdasarkan program studi terdapat perbedaan. Program studi Keuangan dan Perbankan Syariah rasio peminat terhadap yang diterima cenderung meningkat setiap tahunnya. Tahun 2008 rasio peminat dengan diterima adalah 5 : 1. Sedangkan Tahun 2009 dengan rasio 8 : 1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa program studi Keuangan dan Perbankan Syariah merupakan program studi yang memiliki input mahasiswa baru dengan tingkat persaingan cukup ketat, sehingga menjadikan program studi unggulan pertama. Program Studi akuntansi menempati urutan berikutnya dengan tingkat persaingan 6 : 1. Disamping itu program studi Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan Teknik Informasi (TI) termasuk urutan program studi unggulan selanjutnya dengan tingkat persaingan yang relative ketat. Apabila dilihat dari hasil nilai skor ujian mahasiswa baru yang mengikuti testing selama 4 tahun terakhir terlihat mengalami fluktuasi. Gambar 3.3 menjelaskan bahwa mutu dari mahasiswa baru yang diterima di Politeknik Negeri Lhokseumawe setiap tahunnya tergolong kurang memuaskan, dimana nilai skor tertinggi terus menurun, sedangkan nilai terendah semakin meningkat.

Gambar 3.3
Profil Skor Hasil Ujian Mahasiswa Baru
berdasarkan nilai Tertinggi dan Nilai Terendah
(Sumber : PSI, 2009)

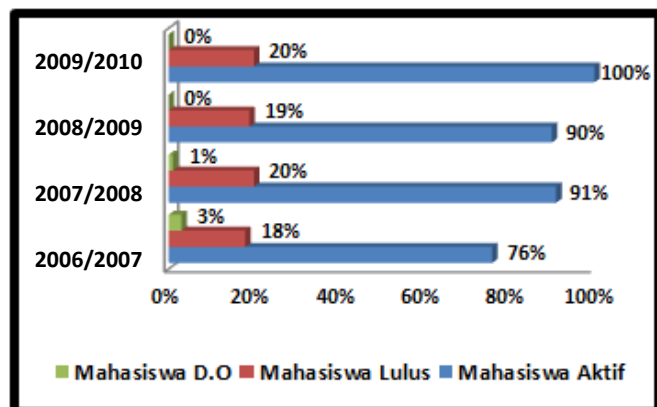


b. Status Akademik Mahasiswa

Jumlah mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe program diploma III dan program diploma IV dari Tahun Akademik 2006/2007 – 2009/2010 cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun Akademik 2009/2010 jumlah mahasiswa aktif meningkat sebesar 10% dibandingkan pada Tahun Akademik 2009/2010. (Gambar 3.4).

Penambahan program studi baru merupakan salah satu faktor yang menyebabkan jumlah mahasiswa Politeknik terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Situasi ini perlu dipertahankan mengingat semakin pesatnya tingkat pertumbuhan perguruan tinggi baru negeri dan swasta tersebar di seluruh Indonesia. Tantangan Politeknik Negeri Lhokseumawe ke depan adalah bagaimana memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk membuka program studi baru unggulan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Sehingga predikat status perguruan tinggi bergolongan menengah dapat dicapai.

Gambar 3.4
Profil Mahasiswa per Tahun
Angkatan berdasarkan Status
Akademik.
(sumber : PSI, 2009)

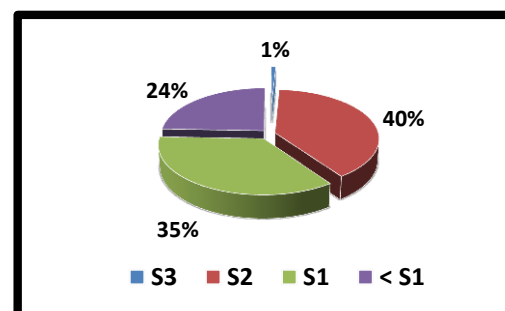


Peningkatan jumlah mahasiswa baru Politeknik Negeri Lhokseumawe haruslah berbanding lurus dengan tingkat kelulusan dan berbanding terbalik terhadap mahasiswa *drop out* (D.O). Pada tahun 2007 sampai tahun 2009 tingkat kelulusan terus meningkat dan mahasiswa yang *drop out* dapat dikurangi sampai ke titik nol persen.

c. Staf Akademik

Jumlah staf akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe sampai Desember 2009 berjumlah 420 staf. Dari jumlah tersebut staf yang berpendidikan S3 ada 4 staf atau 0,81%, staf berpendidikan S2 ada 194 staf atau 39,43%, sedangkan staf berpendidikan S1 ada 174 staf atau 35,37% dan sisanya berpendidikan dibawah S1 ada 120 staf atau 24,39%, (Gambar 3.5).

Gambar 3.5
Profil Staf Akademik Berdasarkan
Tingkat Pendidikan
n = 420
(sumber : PSI, 2009)



Berdasarkan kepangkatan dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe saat ini 77% staf bergolongan III dan 23% telah bergolongan IV. Masih banyaknya dosen bergolongan tiga dianggap hal yang wajar, ini disebabkan karena penerimaan dosen baru terus berlangsung setiap tahunnya serta melanjutkan studi ke jenjang berikutnya sehingga kenaikan pangkat menjadi tertunda. Dilihat dari segi usia rata-rata dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe masih berusia muda. Sampai saat ini Politeknik Negeri Lhokseumawe belum memiliki guru besar.

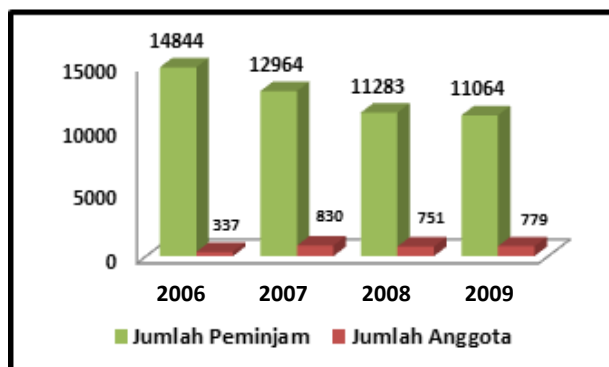
3.1.2.2 Perpustakaan

Bangunan gedung perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe yang selesai pada tahun 2003 memiliki luas 2.250 M². Dilihat dari rasio luas perpustakaan terhadap jumlah mahasiswa adalah 0,85 M². Rasio ini dinilai masih kurang yang idealnya 1,6 M².

Walaupun demikian unit perpustakaan Politeknik Negeri Lhokseumawe dengan segala keterbatasannya secara kontinyu terus menambah kuantitas dan kualitas koleksi bukunya. sampai Desember 2009 jumlah buku sebanyak 13.160 judul dengan 34.776 eksemplar dengan Jumlah pembaca adalah 33.291 orang sedangkan jumlah buku yang dipinjam sebanyak 22.324 buku. Jurnal ilmiah/majalah saat ini berjumlah 5.332 eksemplar dengan 525 judul.

Pemanfaatan perpustakaan dari tahun ke tahun dapat disimpulkan kurang optimal, hal ini terlihat semakin berkurangnya jumlah buku yang dipinjam, disisi lain jumlah anggota terus bertambah (Gambar 3.6).

Gambar 3.6
Profil Perpustakaan Berdasarkan
Jumlah Anggota dan Jumlah
Peminjam
Tahun Angkatan 2006 - 2009
(Sumber : PSI, 2009)



Sejak tahun 2003, unit perpustakaan secara bertahap terus mengalami pembenahan terhadap sarana dan prasarana. Suasana ruang baca yang sejuk dan penerangan yang cukup selalu menjadi prioritas utama selama ini dilakukan oleh unit perpustakaan. Hal yang kurang menggembirakan sampai saat ini adalah masih di terapkannya secara manual dalam pencatatan, baik ketika peminjaman maupun saat pengembalian. Sistem Informasi perpustakaan dirasa masih kurang optimal terutama dalam pencarian buku yang diinginkan, sehingga waktu pengunjung untuk mendapatkan buku menjadi tidak efektif dan efisien.

Unit perpustakaan sampai tahun 2009 memiliki staf berjumlah 8 staf dengan jumlah pelayanan rata-rata 5,5 jam/hari atau 138 jam/bulan. Keadaan ini tentu tidak sebanding dengan jumlah anggota perpustakaan seluruhnya. Tantangan ke depan unit perpustakaan dengan segala kekurangannya adalah bagaimana mengoptimalkan staf yang ada sehingga pelayanan menjadi maksimal.

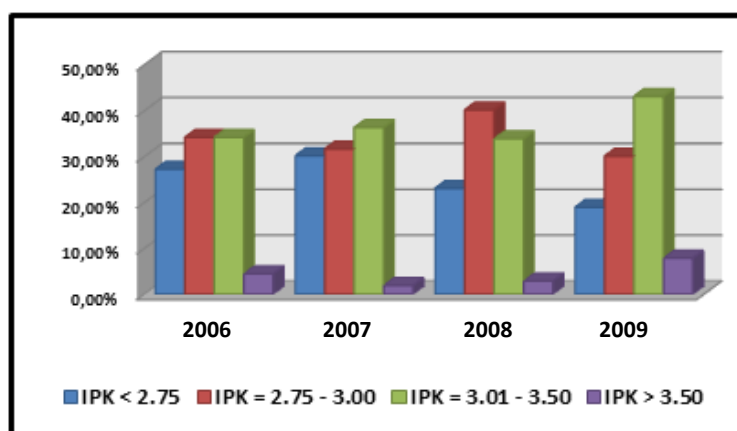
3.1.3 Peningkatan Relevansi

Era globalisasi dan pasar bebas merupakan tantangan terbesar bagi setiap lembaga pendidikan, bagaimana kesiapan masing-masing perguruan tinggi dalam menyikapi isu tersebut. Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan di tingkat lokal maupun nasional semakin lama tingkat persaingannya semakin ketat dan terbatas. Jumlah lapangan kerja masih berbanding terbalik dengan jumlah pencari kerja. Politeknik Negeri Lhokseumawe merupakan pendidikan vokasi dengan lama pendidikan rentang waktu 3 sampai 4 tahun dengan program Diploma III dan Diploma IV harus mampu menjawab segala tantangan ada dan menjadi pekerjaan rumah yang mendesak agar mampu mencetak para lulusan siap bersaing di tingkat lokal dan nasional. Sesuai dengan visinya, PNL menjadi lembaga pendidikan tinggi profesional yang mandiri dan memiliki keunggulan dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, serta sebagai pusat penelitian dan penyebarluasan teknologi terapan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan.

3.1.3.1 IPK Lulusan

Sejak empat tahun terakhir IPK lulusan mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe secara keseluruhan cenderung meningkat. Lulusan dengan IPK antara 3,01 sampai 3,50 terus meningkat dan pada tahun 2009 sudah mencapai 43,14% dari total lulusan, hal ini diikuti lulusan dengan IPK lebih dari 3.50 trendnya juga meningkat. Disamping itu IPK yang kurang dapat ditekan secara bertahap menjadi 18,93% dan 30,07% dari total kelulusan (gambar 3.7).

Gambar 3.7
Profil Jumlah Lulusan
Berdasarkan Tahun Lulus
Dan IPK
(sumber : PSI, 2009)



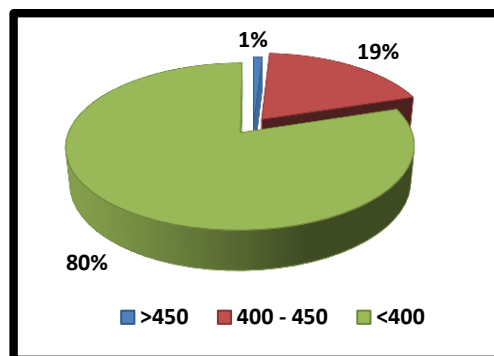
3.1.3.2 Nilai TOEFL Lulusan

Hasil analisis kebutuhan pasar kerja menunjukkan bahwa terdapat beberapa kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing lulusan, yaitu : a) kemampuan akademik yang diukur dengan indeks prestasi, b) kemampuan atau keterampilan praktik yang dibutuhkan pasar kerja, c) keterampilan komputer dan berbahasa asing terutama bahasa Inggris dan d) persiapan menghadapi *psycho-test* dan *personal ability*.

Gambar 3.8 menunjukkan profil nilai TOEFL dan TOEIC mahasiswa baru Politeknik selama 4 tahun terakhir meskipun hasilnya masih jauh dari harapan, bahkan ada yang mendapatkan nilai skor di bawah 100. Nilai yang lebih dari 450 hanya 1% dari total peserta dan 19% skor antara 400 – 450 selebihnya di bawah skor 400 atau 80%. Tes TOEFL dan TOEIC ini diwajibkan

bagi setiap mahasiswa baru, namun demikian pada tahun 2007 kegiatan ini tidak dilaksanakan sementara biaya tes telah dipungut oleh pihak Lembaga Politeknik Negeri Lhokseumawe. Tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan lulusan dalam penguasaan bahasa Inggris agar dapat bersaing baik tingkat lokal maupun nasional.

Gambar 3.8
Nilai rata-rata TOEFL dan TOEIC
Mahasiswa Tahun 2006, 2008 dan 2009
(Sumber : UPT. Bahasa, 2009)



3.1.4 Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Salah satu misi Politeknik Negeri Lhokseumawe pada butir 6 menyatakan bahwa berpartisipasi dan aktif dalam merespon isu global serta trend teknologi dalam upaya peningkatan kapasitas dan akses PNL melalui proses pengembangan, dengan menggunakan metoda ilmiah yang disalurkan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk penerbitan karya ilmiah. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terapan dalam rangka pengembangan profesionalisme serta menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan pada bidang teknik dan ekonomi.

3.1.4.1 Bidang Penelitian

Penelitian yang dikembangkan di PNL merupakan penelitian yang menjurus kepada kajian dan rancangan teknologi tepat guna. Penelitian ini melibatkan industri dan mahasiswa sebagai mitra kerja yang saling menguntungkan, dimana industri akan mendapatkan nilai lebih dari hasil penelitian dan mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu dalam penyusunan tugas akhir.

Kegiatan administrasi penelitian di Politeknik Negeri Lhokseumawe dikelola secara terintegrasi oleh Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPT. P2M), sedangkan kegiatan penelitian dilakukan oleh Laboratorium dan Bengkel di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe, baik penelitian kolaborasi maupun secara mandiri. Sumber dan kegiatan penelitian di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe berasal dari DIPA, NAD dan lain-lain.



Tabel 3.2
Anggaran Penelitian dari Tahun 2006 – 2009

Sumber dana	T a h u n			
	2006	2007	2008	2009
DIPA	150.000.000	200.000.000	520.000.000	710.000.000
NAD	390.000.000	318.000.000	-	-

(Sumber : PSI, 2009)

Berdasarkan sumber dana, penelitian berasal dari DIPA dapat dijelaskan secara berturut-turut yaitu pada tahun 2006 penelitian dilakukan sebanyak 80 judul dengan melibatkan 91 dosen, dari jumlah tersebut hanya 44 judul atau (55%) yang mampu di selesaikan. Pada tahun 2007 jumlah judul sebanyak 20 seluruhnya dapat diselesaikan dengan melibatkan 39 dosen. Pada tahun 2008 sebanyak 52 judul yang dianggarkan namun 30 judul atau (58%) dapat diselesaikan dengan jumlah peneliti yang terlibat 65 dosen, dan pada tahun 2009 hanya 30 judul atau (49%) yang dapat diselesaikan dari total 61 judul serta peneliti yang terlibat 75 dosen.

Selama 4 tahun terakhir rata-rata dibawah 60% penyelesaian kegiatan penelitian mampu diselesaikan kecuali pada tahun 2007 kegiatan penelitian seluruhnya tuntas. Sedangkan jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan ini dari tahun 2006 sampai tahun 2009 rata-rata sekitar 23% dan pada tahun 2010 keterlibatan dosen mencapai 25% dari jumlah dosen seluruhnya.

Demikian halnya kegiatan penulisan Karya Ilmiah, pada tahun 2009 pelaksanaan kegiatan Karya Ilmiah telah menyelesaikan sebanyak 20 judul atau 53% dari 38 judul rencana kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 53% atau Rp. 40.000.000,- dari total dana kegiatan Rp. 76.000.000 serta melibatkan 22 orang dosen. Selanjutnya kegiatan penelitian bersumber dari dana APB Aceh pada tahun 2006 melibatkan 20 mahasiswa (*student grant*) dengan besaran dana Rp. 70.000.000 atau 18% dari total dana, sisanya atau 82% total dana dilaksanakan oleh dosen dan melibatkan 54 dosen peneliti. Pada tahun 2007 seluruhnya dilaksanakan oleh 55 dosen peneliti. Secara keseluruhan realisasi dana penelitian tahun 2006 dan tahun 2007 mencapai 100%.

Berdasarkan komposisi keterlibatan dosen, besar anggaran kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah untuk kedepannya perlu ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya.

3.1.4.2 Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat proses administrasinya terpusat pada Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPT. P2M).

Pada Tabel 3.3 menunjukkan secara keseluruhan anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali tahun 2009, namun peningkatan secara signifikan terjadi pada tahun 2008.

Tabel 3.3

Anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat dari Tahun 2006 – 2009

Sumber dana	T a h u n			
	2006	2007	2008	2009
DIPA	75.000.000	187.500.000	640.000.000	470.000.000
NAD	-	-	-	-

(Sumber : PSI, 2009)

Dari data dapat dijelaskan pada tahun 2006, dari 15 judul yang diajukan hanya 13 judul atau (87%) yang dapat diselesaikan dengan serapan dana Rp. 65.000.000,- serta melibatkan 55 dosen. Tahun 2007 jumlah judul kegiatan sebanyak 25 judul dan 112 dosen yang terlibat. Di tahun 2008 dari seluruh anggaran pengabdian tidak mampu diserap dengan sisa anggaran sebesar Rp. 490.000.000,- atau hanya 15 judul kegiatan terealisasi atau 23% dari 64 judul kegiatan yang dianggarkan serta melibatkan 69 dosen. Pada tahun 2009 hanya 20 judul kegiatan atau 43% dapat diselesaikan dari 47 judul kegiatan yang tersedia dengan serapan dana Rp. 200.000.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 470.000.000,- dan dosen yang terlibat berjumlah 100 orang. Hal aneh yang dirasa adalah selama 4 tahun terakhir kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dana yang berasal dari APB Aceh tidak dianggarkan secara berturut-turut.

3.1.5 Kualitas Pembelajaran

Pada proses pembelajaran silabus merupakan salah satu petunjuk yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun materi perkuliahan. Silabus berisi informasi pokok-pokok bahasan yang menjadi inti materi perkuliahan. Untuk mencapai sasaran dan target kurikulum, silabus merupakan komponen utama yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Berhasil tidaknya suatu proses pendidikan yang dijalankan berdasarkan kurikulum tertentu dapat dilihat dari terpenuhi atau tidak silabus dalam setiap mata kuliah. Disamping itu jumlah SAP, job sheet dan buku ajar yang digunakan termasuk indikator berhasil tidaknya proses belajar mengajar. Selama semester genap tahun ajaran 2008/2009 pencapaian materi kuliah dapat dijelaskan pada Tabel 3.4.

Secara keseluruhan, hanya 2 program studi atau 12% yang tidak mempunyai data dan 1 program studi atau 6% datanya hanya pencapaian silabus. Selanjutnya rata-rata program studi mengalami kekurangan SAP, job sheet maupun buku ajar. Dengan demikian, terindikasi bahwa tingkat kualitas pembelajaran belum dilaksanakan secara maksimal oleh para dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Pencapaian Materi Kuliah

No	Program studi	Pencapaian Silabus (%)	Jml SAP	Jml Kekurangan SAP	Jml Job Sheet	Jml Kekurangan Job Sheet	Jml Buku Ajar	Jml Kekurangan Buku Ajar
1	D3 T. Sipil	95,3	26	29	11	0	7	37
2	D4 T. Sipil	95,8	43	2	10	0	15	30
3	D3 T. Mesin	82	44	11	4	51	18	37
4	D4 T. Prod & Prwtn	####	0	26	0	NA	0	0
5	D3 T. Kimia	96,7	17	8	6	NA	8	17
6	D3 T. Migas	96,8	20	5	4	NA	3	22
7	D4 T.K.Industri	100	2	7	0	7	0	9
8	D3 T. Listrik	####	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	D3 T. Elektronika	93,2	13	20	6	0	3	30
10	D3 T. Telkom	99,8	2	42	6	0	2	42
11	D3 T. IOI	91,3	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12	D4 T. Informasi	####	37	2	1	NA	4	35
13	D4 T. Multimedia	93,1	0	30	3	NA	0	30
14	D3 Akuntansi	93,2	25	0	4	0	3	22
15	D3 K & P	86,5	26	2	4	22	10	16
16	D3 Adm Bisnis	86,8	10	20	3	0	2	28
17	D4 Perbankan Syariah	####	NA	NA	NA	NA	0	NA

(Sumber : UJM-Monev, 2009)

Secara keseluruhan, hanya 2 program studi atau 12% yang tidak mempunyai data dan 1 program studi atau 6% datanya hanya pencapaian silabus. Selanjutnya rata-rata program studi mengalami kekurangan SAP, job sheet maupun buku ajar. Dengan demikian, terindikasi bahwa tingkat kualitas pembelajaran belum dilaksanakan secara maksimal oleh para dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe.

3.1.6 Aset dan *Self Generating Revenue*

Selama ini beberapa hibah kompetisi telah banyak diterima oleh Politeknik Negeri Lhokseumawe. Namun demikian, rencana yang dirancang dalam hibah tersebut belum sepenuhnya berjalan maksimal. Masalah utama adalah koordinasi pemanfaatan *resource* secara bersama. Investasi di beberapa program studi, seperti pengadaan komputer dan buku-buku acuan belum dimanfaatkan secara bersama, dikarenakan akses informasi untuk fasilitas tersebut masih terbatas. Perbaikan manajemen sumber daya perlu dilakukan dan paradigma manajemen sumber daya harus diubah dari manajemen sektoral menjadi manajemen sumber daya lintas sektoral.

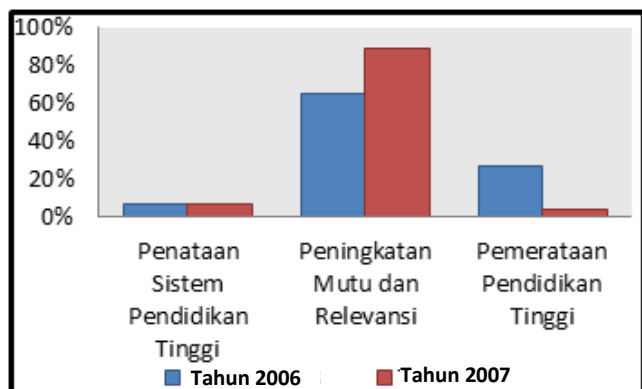
Program hibah di Politeknik Negeri Lhokseumawe berorientasi pada peningkatan pengelolaan program studi dan peningkatan efisiensi internal. Beberapa program studi dinilai masih memerlukan pengembangan di bidang ini. Sementara itu, program studi yang pernah mendapatkan hibah harus lebih dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi eksternal dan mengembangkan program unggulan. Selain itu perlu juga dikembangkan aktivitas untuk meningkatkan pendapatan lembaga dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya hasil investasi dari program hibah yang diperoleh.

Paradigma baru pengelolaan perguruan tinggi telah menuntut setiap perguruan tinggi untuk mandiri dan dapat meningkatkan eksistensi diantara perguruan tinggi lainnya. Agar menjadi sebuah perguruan tinggi yang berotonomi dan mandiri yang didukung unit internal yang kuat, Politeknik Negeri Lhokseumawe harus berupaya semaksimal mungkin untuk menggali penerimaan dari berbagai sumber dan potensi yang ada di berbagai peluang yang mampu direbut. Untuk menjadi perguruan tinggi yang berotonomi, Politeknik Negeri Lhokseumawe harus mampu menggali penerimaan yang bersumber dari PNBP khususnya penerimaan di luar uang pendidikan (SPP). Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya dan membangun jaringan dengan *stakeholders* untuk menunjang kemandirian serta mengembangkan unit-unit bisnis dengan memanfaatkan keahlian sumber daya manusia dan aset-aset yang tersedia. Pembiayaan Politeknik Negeri Lhokseumawe berasal dari pembiayaan pendidikan tinggi yang bersumber dari subsidi pemerintah dalam bentuk anggaran rutin dan dana masyarakat.

3.1.6.1 Anggaran Penyelenggaraan Kegiatan dan Usaha Pendidikan Tinggi

Rentang waktu tahun 2006 dan tahun 2007, jumlah anggaran yang bersumber dari pembangunan (eks proyek) Politeknik Negeri Lhokseumawe berkisar antara Rp. 13-31 Milyar. Ditinjau dari alokasi anggaran, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2007 yaitu dari Rp. 13 Milyar naik menjadi Rp. 30 Milyar atau terjadi kenaikan sebesar 224%. Selama 2 tahun pengalokasian anggaran rata-rata proporsi yang paling besar dialokasikan pada program Peningkatan Mutu dan Relevansi sebesar 82%, selanjutnya Pemerataan Pendidikan Tinggi 11% dan Penataan Sistem Pendidikan Tinggi 7%.

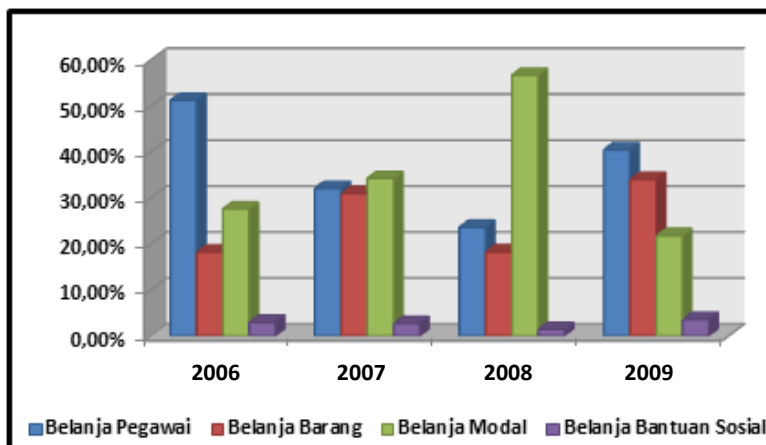
Gambar 3.9.
Profil Alokasi Anggaran
Eks Proyek Politeknik Negeri
Lhokseumawe Tahun 2006-2007
(Sumber : PSI, 2009)



3.1.6.2 Anggaran Administrasi Umum

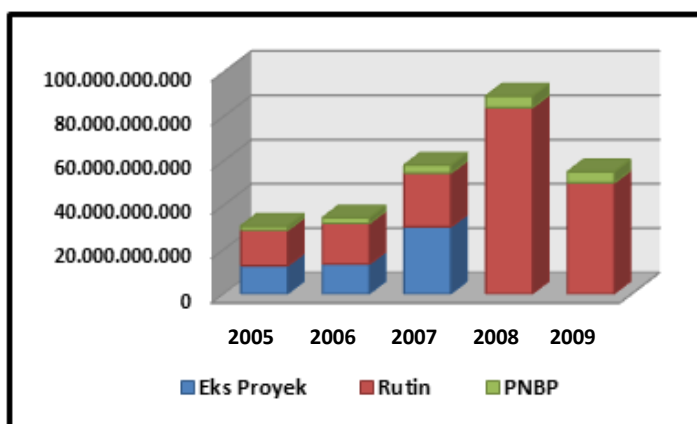
Anggaran administrasi umum Politeknik Negeri Lhokseumawe selama 4 tahun terakhir ditunjukkan pada gambar 3.10. Anggaran ini rata-rata mengalami revisi hingga 2 kali kecuali pada tahun 2009 terjadi sampai 3 kali revisi. Meskipun demikian, daya serap realisasi anggaran rata-rata sebesar 89,54 %.

Gambar 3.10
Profil Alokasi
Anggaran
Administrasi Umum
Berdasarkan Pos
Pengeluaran
Tahun Anggaran
2006–2009
(Sumber : PSI, 2009)



Gambar 3.10 dapat dijelaskan pengalokasian anggaran tahun 2006 dan tahun 2007 masih memisahkan antara anggaran yang berasal dari eks proyek dengan anggaran rutin. Sedangkan untuk tahun berikutnya, anggaran eks proyek dimasukkan dalam anggaran rutin. Secara keseluruhan terlihat fluktuasi anggaran terjadi pada setiap tahun. Namun, pada tahun 2008 jumlah anggaran secara total mengalami peningkatan yang signifikan. Akibatnya anggaran untuk belanja modal naik dengan tajam hampir mencapai 60%. Penambahan belanja modal ini seluruhnya digunakan untuk lanjutan pembangunan gedung kuliah mahasiswa, gedung auditorium, rehab ruang bengkel dan laboratorium. Proporsi anggaran rutin sangat mendominasi dalam pembiayaan operasional Politeknik Negeri Lhokseumawe khusus tahun 2008 dan 2009 dibandingkan anggaran dana masyarakat (PNBP), (gambar 3.11).

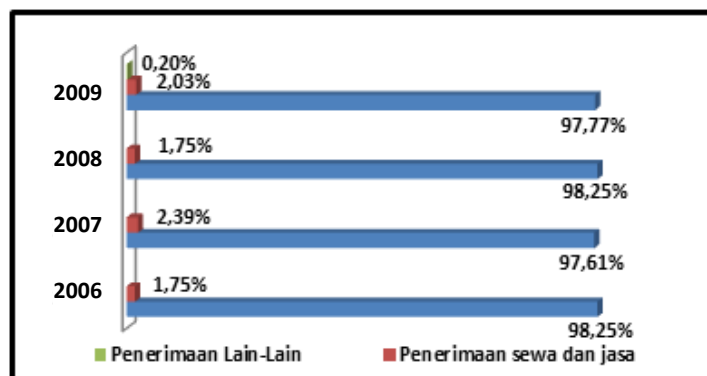
Gambar 3.11
Profil Besar Anggaran
Administrasi Umum
Politeknik Negeri
Lhokseumawe Berdasarkan
Sumbernya.
(Sumber : PSI, 2009)



3.1.6.3 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Politeknik Negeri Lhokseumawe porsi terbesar berasal dari penerimaan Pendidikan. Rata-rata pendapatan pendidikan dari tahun 2006 sampai tahun 2009 sebesar 97,97%. Penyumbang dana terbesar berasal dari uang kuliah (SPP) mahasiswa. Sedangkan pendapatan sewa dan jasa serta lain-lain kurang dari 3% dari total seluruhnya (gambar 3.12). Pendapatan sewa dan jasa ini hanya bersumber dari sewa asrama mahasiswa serta sewa kantin. Apabila dibandingkan antara pendapatan sewa/jasa dengan asset dan sumber daya milik Politeknik tentunya tidak sesuai. Oleh karena itu Politeknik Negeri Lhokseumawe harus mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk menggali potensi-potensi dana melalui sewa/jasa dan lain-lain di luar dari pada pendapatan uang kuliah mahasiswa.

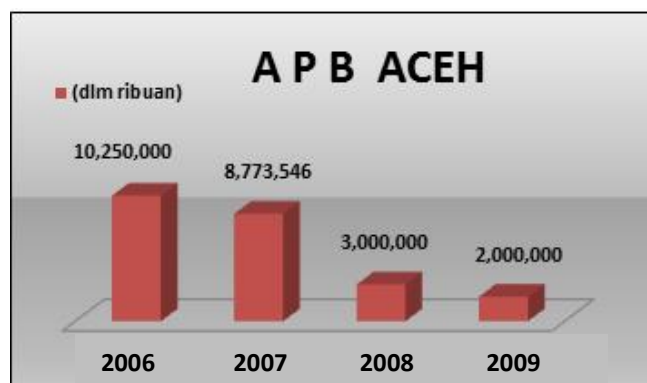
Gambar 3.12
Profil Pendapatan Negara
Bukan Pajak Politeknik
Negeri Lhokseumawe
Tahun 2006 – 2009
(Sumber : PSI, 2009)



3.1.6.4 Pendapatan APB Aceh

Penerimaan anggaran dari Pemerintah Aceh terus menurun setiap tahunnya. Penurunan signifikan sebesar 65% terjadi pada tahun 2008. Situasi seperti ini tentunya sangat mempengaruhi rencana kegiatan yang telah disusun. Hal ini harus menjadi perhatian Politeknik Negeri Lhokseumawe guna mencermati tentang keberpihakan serta tanggung jawab pemerintah daerah melalui anggaran dalam memajukan pendidikan Aceh umumnya, Politeknik Negeri Lhokseumawe khususnya. Apabila dibandingkan dengan total anggaran Politeknik Negeri Lhokseumawe secara persentase dari tahun 2006 sampai tahun 2009 berturut-turut, yaitu 30% , 15%, 4% dan 3%. Kecilnya proporsi anggaran APB Aceh menjadi pekerjaan rumah bagi Politeknik Negeri Lhokseumawe untuk meningkatkan proporsi tersebut.

Gambar 3.13
Profil Penerimaan Anggaran
Dari APBD Aceh
Tahun 2006 - 2009
(Sumber : Proyek NAD, 2009)



3.2 Analisis Kondisi Eksternal

Selain analisis kondisi internal, selanjutnya perlu dianalisis kondisi eksternal yang akan mempunyai dampak langsung terhadap aktifitas lembaga di masa mendatang.

Sejak tidak beroperasinya lagi beberapa perusahaan besar di Lhokseumawe, dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi keberadaan Politeknik Negeri Lhokseumawe saat ini. Hal ini dirasa wajar karena awalnya pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe di kota Lhokseumawe dengan pertimbangan salah satunya adalah banyaknya perusahaan besar yang telah beroperasi, seperti perusahaan Mobil Oil, Co diikuti dengan perusahaan turunannya seperti PT. Arun, NGL, pabrik Pupuk Asean Aceh Fertilizer (AAF), pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT. Kertas Kraft Aceh, PT. Humpus, dan lain-lain. Disamping dampak penutupan beberapa perusahaan besar tersebut, maka perlu dianalisis dampak lain yang dapat mempengaruhi keberlanjutan Politeknik Negeri Lhokseumawe selanjutnya.

3.2.1 Tempat Kerja yang Prospek bagi Lulusan.

Data statistik yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik menunjukkan angka pengangguran di Aceh pada triwulan I 2010 mencapai 164,4 ribu jiwa, meningkat sebesar 14,4 ribu dibandingkan periode Agustus 2009. Angka tersebut mengimplikasikan bahwa ribuan generasi muda Aceh yang akan masuk dalam kategori angkatan kerja baru, apalagi ketika mereka harus berlomba dengan puluhan ribu pengangguran lainnya. Pengangguran adalah salah satu problematik sosial kemasyarakatan, terus bertambah seperti mata rantai (saling bersambung) tanpa dibarengi dengan tingkat ketersediaan lapangan kerja dalam berbagai aspek kehidupan. Pengangguran seakan menjadi “beban” yang menumpuk di atas pundak pemerintah. Namun, sudah menjadi keharusan dan tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan masalah klasik tersebut. Kebijakan dan strategi pemerintah selama ini, belum mampu menjawab tantangan guna meminimalisir atau menekan angka pengangguran yang tumbuh subur ibarat jamur di musim hujan.

Masalah pengangguran adalah problem sosial yang sudah akut dan sistemik. Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran di Aceh, salah satunya adalah terkait pengelolaan dan orientasi institusi pendidikan yang ada di Aceh. Tingkat pengangguran terdidik yang tinggi di Aceh, sedikit banyak juga memberi penilaian terhadap kualitas pendidikan itu sendiri. “Selamat menjadi pengangguran baru” sering terdengar diungkapkan saat pelaksanaan sebuah seremonial wisuda. Seakan lulusan pendidikan tinggi di Aceh, erat kaitan dengan bertambahnya daftar pengangguran baru. Domain tersebut lahir karena selama ini benar adanya jika banyak lulusan pendidikan tinggi di Aceh tidak mampu bersaing, tidak terserap dunia kerja dan akibat minimnya akses lapangan pekerjaan.

Kualifikasi dari data pengangguran yang diumumkan Badan Pusat Statistik Aceh menunjukkan bahwa, pengangguran tamatan setingkat SLTA sebesar 50,3 persen atau sekitar 82,7 ribu orang. Untuk tamatan diploma dihuni oleh 7,2 ribu penganggur dan pada tingkat lulusan perguruan tinggi/universitas pengangguran mencapai 5,3 ribu jiwa. Data di atas dapat menjadi rujukan terhadap bagaimana pola dan strategi suatu perguruan tinggi dalam mengantisipasi tiap lulusan yang dikeluarkan. Tempat kerja yang prospek bagi lulusan harus menjadi garansi terhadap para lulusan yang dikeluarkan, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.



3.2.2 Pemerintah

Tentunya pihak yang paling bertanggungjawab atas tingginya angka pengangguran di Aceh adalah pemerintah. Semua permasalahan pengangguran bermuara pada lemahnya kinerja pemerintah Aceh dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan. Secara meyakinkan pemerintah belum mampu melakukan langkah strategis guna terbukanya akses lapangan kerja bagi putra-putri Aceh. Disinilah dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam upaya menekan lonjakan angka pengangguran di Aceh. Harapan besar ada dipundak pemimpin defenitif terpilih di Aceh. Gubernur terpilih harus visioner, bagaimana membuka akses dan iklim investasi yang sehat di Aceh guna menyerap tenaga kerja lokal. Menambah alokasi anggaran pendidikan tinggi terutama untuk pemenuhan fasilitas yang memadai. Membuat gebrakan peningkatan ekonomi terpadu (modal usaha) kepada para wirausaha muda di Aceh.

Menempuh upaya untuk menghidupkan kembali pabrik-pabrik vital, dan membangun industri lokal berskala nasional Disamping itu, pemerintah Aceh dapat merevitalisasi semua lahan tidur yang ada di Aceh menjadi lahan produktif dengan program komoditas unggulan. Merumuskan program satu desa, satu koperasi rakyat dan berbagai strategi lainnya yang mampu meminimalisir angka pengangguran di Aceh. Jangan sampai data yang dirilis Badan Pusat Statistik hanya menjadi topik diskusi tanpa aksi nyata dari semua pihak terutama dari tanggung jawab pemerintah.

3.2.3 Teknologi

Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan teknologi informasi, perguruan tinggi di Indonesia sudah waktunya mengembangkan pendidikan berbasis sistem informasi agar mampu mengikuti perubahan zaman. Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga dengan perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi, yang tidak lagi terbatas pada informasi surat kabar, audio visual dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang salah satu diantaranya melalui jaringan Internet. Penggunaan teknologi dan komunikasi khususnya di bidang pendidikan ada terjadi lima penggeseran di dalam proses pembelajaran yaitu:

- Pergeseran dari pelatihan ke penampilan,
- Pergeseran dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja,
- Pergeseran dari kertas ke “on line” atau saluran,
- Pergeseran fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja,
- Pergeseran dari waktu siklus ke waktu nyata

Keunggulan teknologi informasi yang diperankan oleh Internet dalam menyediakan informasi apa saja yang ditayangkan secara multimedia telah membawa perubahan dalam budaya belajar khususnya dalam Proses Belajar Mengajar (PBM). Saat ini, hanya lembaga pendidikan (berbagai negara, telah menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dengan menggunakan bantuan teknologi informasi), pendidikan seperti ini dinamakan sebagai e-Education,



e-Learning, e-Campus, Tele-Educaton, Cyber-Campus, Virtual University, dan sebagainya yang juga dilengkapi dengan digital library termasuk diantaranya e-Book.

Sepertinya model pendidikan e-Education ini, akan sangat diandalkan pada saat ini dan dimasa mendatang. Model e-Education dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk dapat menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Model yang dikembangkan dapat saja berbentuk off-line, real time, dan online, yang bersifat non-interactive, semi interactive, atau fully interactive. Penerapan e-Education perlu difokuskan pada learning and teaching process, berarti bahwa model yang diciptakan juga harus berbentuk e-Learning dan e-Teaching dan implementasinya memerlukan suatu software.

Pengaruh yang paling signifikan dari perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap dunia pendidikan adalah terjadinya perubahan paradigma pendidikan dari paradigma pengajaran (*teaching*) menjadi paradigma pembelajaran (*learning*). Dalam buku “Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan”, Mantan Dirjen Dikdasmen Depdiknas, Indrajati Sidi, Ph.D (2002) menjelaskan bahwa perubahan visi belajar di sekolah sesuai dengan visi pendidikan UNESCO abad ke-21, yang lebih mendasarkan pada paradigma *learning*, tidak lagi pada *teaching*.

Keempat visi pendidikan itu adalah (1) *learning to think* (belajar berfikir, berorientasi pada pengetahuan logis dan rasional), (2) *learning to do* (belajar berbuat / hidup, berorientasi pada *how to solve the problem*), (3) *learning to be*, (belajar menjadi diri sendiri, berorientasi pada pembentukan karakter), dan (4) *learning to live together* (belajar hidup bersama, mengarahkan pada kerja sama dan sikap toleran).

Dengan demikian penggunaan teknologi informasi komputer harus mampu menjadikan Politeknik Negeri Lhokseumawe lebih unggul dari perguruan tinggi lainnya di masa yang akan datang.



BAB 4

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 2010-2024

Mencermati perkembangan teknologi dan tatanan peradaban dunia yang sangat dinamis, tidaklah mudah bagi suatu lembaga perguruan tinggi dalam menyusun kerangka pengembangannya untuk jangka panjang. Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang berbasis keahlian dan keterampilan, dalam sistem pendidikan nasional keberadaan pendidikan politeknik merupakan salah satu penggerak yang diharapkan mampu mempromosikan keunggulan kompetitif bangsa dalam penerapan iptek pada masa sekarang dan mendatang. Oleh karenanya PNL harus sangat bijak dan cerdas untuk merumuskan kerangka pengembangannya dalam menghadapi gelombang perubahan yang begitu cepat. Tantangan kedepan yang terus bergerak dan sukar diprediksi, menghendaki solusi yang obyektif dan sasaran yang dinamik, tidak terdapat solusi tunggal, dibutuhkan kemampuan institusi PNL untuk memilih solusi diantara yang terbaik dengan rambu-rambu yang “*challenging, inspiring, encouraging*”.

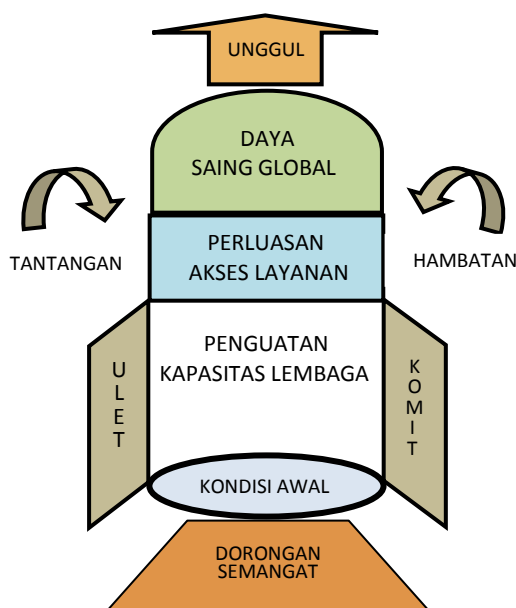
Pengembangan jangka panjang Politeknik Negeri Lhokseumawe (2010-2024) kedepan perlu ditetapkan dengan memperhatikan arah dan sasaran kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang salah satu pilarnya adalah memperkuat kemampuan SDM dan iptek didalam koridor ekonomi. Arah kebijakan pengembangan PNL tetap konsisten dengan peran yang diemban sebagai jalur pendidikan vokasi sesuai dengan visi dan misinya, serta mengacu pada rencana strategis Politeknik se Indonesia yang menghendaki perlunya reorientasi dan reposisi peran politeknik kedepan. Strategi pengembangannya dikaitkan dengan rencana strategis pendidikan nasional dan strategi jangka panjang Dikti yang tertuang dalam HELTS. Program pengembangan strategis yang menjadi fokus utama berorientasi pada; peningkatan kualitas, peningkatan produktifitas proses pendidikan dan pembelajaran yang relevan, peningkatan akses dan ekuitas. Dasar penyusunannya dimulai dari kondisi PNL saat ini dengan segala capaian dan modal dasar yang dimiliki sebagaimana yang telah dibahas pada bab 3 tentang analisis kondisi internal dan eksternal, serta berpatokan pada hasil implementasi Rencana Induk Pengembangan (RIP) PNL sebelumnya, sebagai *entri point* untuk pelaksanaan selanjutnya. Selain itu dengan keluarnya undang-undang baru (UU No. 12 tahun 2012) tentang pendidikan tinggi lebih memberi peluang sekaligus tantangan bagi PNL dalam menyusun rencana pengembangannya, terutama dalam penyelenggaraan program *postgraduate* (magister terapan dan doctor terapan) sehingga PNL kedepan dapat mensejajarkan diri dengan perguruan tinggi unggul lainnya di Indonesia.

Kerangka Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan pentahapan program kebijakan pengembangan PNL 2010-2024 seperti ditunjukkan pada gambar 4.1, dibagi pada tiga periode yang saling bersinergi, terintegrasi, berkelanjutan, dan saling memperkuat dengan harapan kedepan PNL menjadi model pendidikan yang unggul dikelasnya. Tema pengembangan untuk setiap periode sebagai berikut;

[1] Periode I, Penguatan Kapasitas Lembaga (2010-2014);

[2] Periode II, Perluasan Akses Layanan (2015-2019);

[3] Periode III, Daya Saing Global (2020-2024).



Gambar 4.1. Kerangka RIP PNL (*challenging, inspiring, encouraging*)

Pengembangan periode I (2010-2014) lebih difokuskan pada pemenuhan sarana-prasarana pendidikan yang optimal, peningkatan tatakelola PNL, pengembangan mutu dan sumberdaya. Pengembangan periode II (2015-2019) ditekankan pada peran PNL untuk meningkatkan daya saing dan mendukung program pembangunan melalui perluasan akses layanan, dan pada periode III (2020-2024) pengembangannya menuju PNL unggul dengan daya saing global dan target pada tahun 2024, PNL sebagai salah satu penggerak utama dalam mendukung pembangunan kekuatan ekonomi nasional.

4.1. Arah Pengembangan PNL Periode I

Penguatan Kapasitas Lembaga (2010-2014)

Pada tahap I (pertama) Rencana Induk Pengembangan Politeknik Negeri Lhokseumawe dimulai pada persiapan penguatan kelembagaan Politeknik Negeri, yaitu persiapan dalam rangka membangun kerangka dasar yang kuat untuk menjadikan Politeknik Negeri Lhokseumawe lebih berperan dalam pembangunan daerah, nasional maupun regional.

Peranan Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam mendukung pembangunan daerah, nasional dan regional mulai saat ini harus ditingkatkan. Peranan tersebut tidak hanya dalam menyiapkan tenaga vokasi terampil (diploma 1, 2 dan 3) saja. Tetapi diharapkan menjadi



pembina pendidikan vokasi di Aceh dan penyelenggara pendidikan sain terapan (diploma 4) dan magister terapan, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Untuk mereorientasi dan mereposisikan kembali peran PNL dalam pembangunan diperlukan organisasi PNL yang visioner, sehat, dan tangguh.

Politeknik Negeri Lhokseumawe harus mempunyai perencanaan berkelanjutan dalam jangka pendek (tahap I), jangka menengah (tahap II) dan jangka panjang (tahap III) dan seterusnya, yang digambarkan atau dituangkan didalam Rencana Induk Pembangunan PNL, Rencana Stategis setiap tahapan dan Rencana Tahunan setiap tahun.

Politeknik Negeri Lhokseumawe harus memiliki manajemen yang sehat, akuntabel, komptebel, terbuka, dan konsisten melaksanakan program-programnya secara bertahap dengan baik, serta menjamin mutu pelaksanaan kegiatan setiap tahapan dengan baik.

Politeknik Negeri Lhokseumawe harus serius meningkatkan peringkat kualitas manajemen kelembagaan dengan ditandai perolehan hasil audit internal maupun eksternal; minimal predikat wajar tanpa syarat, semua program studi dan institusi minimal memperoleh akreditasi B sampai tahun 2012.

Selanjutnya peningkatan kualitas laboratorium yang ada menjadi laboratorium terakreditasi minimal satu laboratorium setiap jurusan pada akhir tahap pertama tahun 2016.

Persiapan program penguatan kelembagaan PNL yang segera dilaksanakan sejak tahun 2010, meliputi program-program sebagai berikut:

A. Pemantapan Tata Kelola

1. Aktualisasi Penataan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Kelembagaan di dalam lingkungan PNL.

- a. Menata kembali Tugas pokok, fungsi dan Kewenangan setiap unit kerja sesuai kebutuhan dan dinamika kondisi untuk memperlancar tugas-tugas, untuk mencapai visi dan misi PNL (meliputi penataan Struktur Organisasi baku, kewenangan, SOP baku, dan lain-lain)
- b. Penataan Dokumen Tupoksi, SOP
- c. Penambahan Kelembagaan baru jika diperlukan.

2. Menjalankan Manajemen Mutu.

Pada tahun 2011 PNL secara sungguh-sungguh menjalankan manajemen mutu secara kongkrit; yaitu menjalankan prinsip-prinsip siklus manajemen sebagai langkah persiapan menuju perubahan kondisi PNL sekarang ini. Yaitu dalam kaitannya dengan Perencanaan (*Planning*), Pelaksanaan (*Do*), Pengawasan (*Check*), Tindakan Perbaikan Kondisi (*Action*), pada pelayanan administrasi secara umum (pada administrasi PNL), dan pelayanan proses belajar mengajar (pada seluruh jurusan dan prodi).

3. Penataan Tupoksi dan Jenjang Karier untuk Tenaga Teknisi

Program peralihan tenaga teknisi fungsional umum menjadi tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) menjadi prioritas tahun pertama (2011) pada tahap pertama. PLP sebagai tenaga penunjang pendidikan merupakan partner penting bagi tenaga pendidik (dosen) dalam mengemban tugas-tugas tridharma perguruan tinggi dalam dunia pendidikan tinggi.



Khususnya pada Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi dimana ranah pembelajaran psikomotorik dan afektif lebih diutamakan dibandingkan ranah pengetahuan teori sehingga jumlah jam kegiatan di Laboratorium lebih besar dari jumlah jam dikelas teori, maka menjadi sangat penting untuk merencanakan penataan laboratorium secara umum dan/atau penataan teknisi dan jenjang kariernya menjadi PLP secara khusus sesuai yang sudah diatur dalam Kepmenpan No. 3 tahun 2010 untuk dimasukkan di dalam sebuah Rencana Induk Pengembangan PNL pada tahap pertama sebagai berikut:

1. Pada tahun 2011 diharapkan perangkat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kepmenpan no.3 tahun 2010 sudah terbentuk; diantaranya pembentukan Tim Penilaian Angka Kredit PLP, Pembinaan/penyesuaian system dokumen laboratorium secara interen lab untuk menyongsong Kepmenpan no. 3 tahun 2010, penyediaan anggaran, Program pembinaan teknisi untuk menuju PLP, dll.
2. Pada tahun kedua tahap pertama (2013) diharapkan minimal 50% teknisi sudah mendapatkan jabatan fungsional (inpassing) sesuai dengan pendidikan dan massa kerjanya.
3. Pada tahun ke empat tahap pertama (2014) ditargetkan 10% yang telah menduduki jabatan PLP sudah mengajukan kenaikan pangkat jenjang berikutnya, dan 80% dari seluruh teknisi telah menduduki jabatan PLP.
4. Pada tahun ke lima tahap pertama (2015) diharapkan 20% PLP yang telah menduduki jabatan PLP mengajukan kenaikan pangkat jenjang berikutnya, dan seluruh teknisi (100%) sudah beralih menjadi jabatan fungsional PLP.

B. Membangun Sistem Informasi dan Data Terpadu

Pada tahun 2015 PNL harus sudah menyelesaikan sistem informasi dan data terpadu secara outline yang dapat meningkatkan komunikasi, kinerja dan citra manajemen PNL secara keseluruhan. Kegiatan membangun sistem informasi dan data terpadu meliputi pada perluasan:

1. Pengembangan Pangkalan Data Terpadu (PNL, Jurusan) yang dapat mendukung EPSBED.
2. Peningkatan pelayanan belajar mengajar melalui intranet, internet;
3. Web Site PNL, Jurusan, Laboratorium.
4. Adanya terbitan Kampus.
5. Radio Kampus

C. Meningkatkan Kualitas Lembaga dan SDM PNL

Peringkat pengakuan oleh lembaga audit eksternal (BAN PT, dan lembaga sertifikasi keahlian lainnya) terhadap PNL baik tingkat institusi, jurusan, program studi, dan SDM PNL merupakan tolok ukur keberhasilan program-program yang sudah dilakukan selama ini.

Peningkatan kualitas lembaga dan SDM PNL menjadi hal yang sangat penting dan harus mendapat dukungan dari semua pihak pada tahap I ini, baik pada tingkat pengambilan kebijakan, program, pendanaan, maupun partisipasi atau keikutsertaan semua orang di PNL



untuk meningkatkan kualitas. Program peningkatan kualitas diarahkan pada program kegiatan yang diarah pada pencapaian hal sebagai berikut:

1. Peningkatan akreditasi lembaga (Institusi, Jurusan, Program Studi, Laboratorium)
2. Peningkatan jumlah dosen bersertifikat pengajar profesional.
3. Peningkatan jumlah dosen bersertifikat keahlian dibidangnya.
4. Peningkatan jumlah teknisi yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian dibidangnya.

D. Penyediaan Beasiswa dan Anggaran untuk Pendidikan dan Keahlian Dosen Khusus untuk memenuhi persyaratan minimal pembukaan prodi baru dan program TUK.

Tersedianya beasiswa secara bertahap menjadi hal yang sangat penting pada tahap persiapan atau tahap I untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi persyaratan minimal. Tersediannya beasiswa dapat dilakukan melalui sumber APBN, APBD kerjasama dengan perusahaan maupun donator lainnya yang digunakan untuk peningkatan pendidikan dan keahlian:

1. D3 ke D4 untuk teknisi
2. D4 ke M.ST untuk Teknisi
3. S2 ke S3 untuk dosen
4. Kegiatan Training Keahlian dosen dan teknisi
5. Ujian Kompetensi keahlian untuk dosen dan teknisi.

E. Menjalinkan Kerjasama Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat Serta Perlindungan Hukum

Sebagai lembaga pendidikan PNL perlu membangun kerjasama dengan semua pihak atau instansi baik di dalam maupun luar negeri baik pemda, instansi pendidikan, penelitian, ketenagakerjaan, perusahaan dan industry lainnya untuk memaksimalkan peran PNL dimasa akan datang. Kerjasama tersebut meliputi:

1. Antar PNL dengan PT lain (dalam dan luar negeri)
2. Antara PNL dengan Politeknik lain
3. Antara PNL dengan dunia Industri atau dunia usaha lain.
4. Antara PNL dengan Kelompok Masyarakat.
5. Menyiapkan Perlindungan Hukum

F. Penataan Pengelolaan Fasilitas Kampus

Penataan Pengelolaan Fasilitas Kampus didasarkan kepada peningkatan fungsi dan pengaruhnya terhadap kelancaran proses belajar mengajar dan kenyamanan atmosfer akademik.

1. Air bersih, Sanitasi dan Kebersihan
 - Air bersih untuk kegiatan laboratorium, air bersih untuk hunian (asrama dan Perumahan), air bersih untuk kamar mandi/WC perkantoran.
 - Saluran buangan
 - Kebersihan kampus; tempat pembuangan sampah, kerjasama dengan dinas kebersihan.



-
2. Ruang Kuliah, Ruang Kuliah serba guna
 3. Internet Kampus
 4. Keamanan Kampus
 5. Pencegahan Pemadam Kebakaran
 6. Sarana Jalan
 7. Perawatan Perumahan dinas
 8. Sarana Olah Raga
 9. Tempat Parkir
 10. Fasilitas Kantin, fotocopy dan alat tulis, untuk mahasiswa di dalam kampus yang memadai.
 11. Pengelolaan Asrama Mahasiswa.
 12. Sarana Tempat Ibadah/ mesjid kampus

G. Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Untuk mempersiapkan reorientasi dan reposisi peranan PNL maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung, oleh karenanya perlu penambahan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan sebagai berikut:

1. Fasilitas Perpustakaan (Peningkatan jumlah buku dan judul buku: eBook, Journal)
2. Fasilitas Laboratorium (Lab. Riset dan Laboratorium untuk Pelatihan)
3. Fasilitas Laboratorium Bahasa
4. Fasilitas Ruang Kuliah
5. Ruang Pameran
6. Pusat Kajian dan Pengembangan Program Study baru
7. Pusat Kajian dan Konsultasi Teknologi Unggulan
8. Fasilitas Alat Bantu Proses Belajar Mengajar
9. Fasilitas Internet

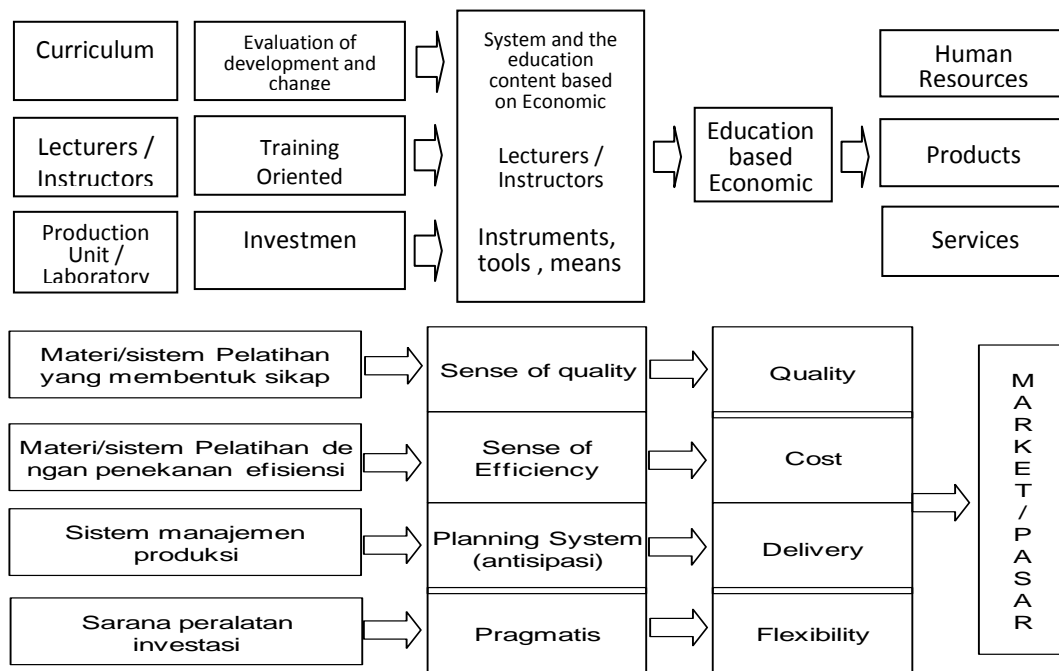
4.2. Arah Pengembangan PNL Periode II

Perluasan Akses Layanan (2015-2019)

Arah dan kebijakan dalam pengembangan PNL pada periode II dengan tema perluasan akses layanan lebih difokuskan pada peran lembaga untuk meningkatkan daya saing bangsa, kerangka baru otonomi perguruan tinggi yang sehat dan akuntabel, serta untuk mendorong pembangunan daerah dan nasional sesuai dengan kerangka konsep MP3EI, dimana untuk koridor ekonomi wilayah sumatera difokuskan pada sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta sebagai lumbung energi nasional. Strategi pengembangannya mengikuti renstra politeknik se Indonesia yang salah satunya adalah penyelarasan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, dengan memperhatikan kelanjutan dari program pengembangan periode I (penguatan kapasitas lembaga), artinya bila pengembangan periode pertama sudah terpenuhi selanjutnya PNL lebih percaya diri untuk melangkah ke arah pengembangan periode II, sementara beberapa komponen program pengembangan pada periode I terus ditingkatkan dengan tetap melakukan evaluasi setiap tahapannya. Perluasan

akses layanan dimaksud perlu diikuti oleh penambahan sumberdaya dan program yang dilandasi oleh kebutuhan nyata baik dari sisi perguruan tinggi sebagai penyedia layanan (*supply side*), maupun dari sisi masyarakat pengguna layanan (*demand side*). Penyediaan dan penambahan sumberdaya meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya sarana-prasarana, sumberdaya keuangan, sumberdaya informasi, dan sumberdaya manajemen.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah tantangan-tantangan global yang muncul berkaitan dengan kepentingan industri, pendidikan, dan masyarakat secara umum. Untuk itu PNL harus selalu membuka diri untuk dipengaruhi dari luar (pasar kerja, *stakeholders*) melalui penyiapan kurikulum dan program-program yang relevan, sehingga dapat memberi layanan prima kepada pihak pengguna, sebaliknya pengguna akan menemukan dengan mudah dalam pencarian orang-orang yang berkualitas sesuai dengan standar mereka. Selanjutnya PNL juga harus mempertimbangkan bahwa dalam pengadaan sarana-prasarana, peralatan laboratorium, bahan habis pakai dan fasilitas penunjang lainnya membutuhkan investasi yang cukup besar, oleh karenanya penekanan terhadap “*efisiensi*” mutlak diperlukan dalam segala aktifitas. Solusi yang paling tepat dilakukan dalam konteks perluasan akses layanan (pengembangan periode II) ini adalah “*Pendidikan Berwawasan Ekonomi*” dimana disatu sisi tetap melakukan efisiensi terutama pada kegiatan praktik laboratorium yang diarahkan pada *production based learning*, dan disisi lain PNL perlu terus meningkatkan akses layanan melalui kerjasama-kerjasama dan program afiliasi lainnya untuk meningkatkan PNBP lembaga yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan prinsip nirlaba. Model pendidikan berwawasan ekonomi dapat ditunjukkan pada Gambar 4.2, dan beberapa komponen pengembangan signifikan yang diperlukan, misalnya kurikulum, pengajar, laboratorium dan tentunya perlu mempersiapkan unit produksi.



Gambar 4.2. Pendidikan Berwawasan Ekonomi



Selaras dengan *trend* perkembangan dunia pendidikan secara global serta upaya percepatan pembangunan ekonomi nasional, berdasarkan data EPSBED, saat ini terdapat 172 politeknik yang tersebar di seluruh Indonesia, dimana dari jumlah tersebut 32 politeknik berstatus negeri dan 140 politeknik berstatus swasta termasuk didalamnya politeknik milik Pemda. Dari jumlah tersebut, total jumlah program studi adalah sebanyak 846, yang meliputi kelompok program studi Rekayasa, Pertanian dan Tata Niaga. Secara proporsional keberadaan pendidikan politeknik hanya 3 % dari total jumlah perguruan tinggi di Indonesia (3.016) maupun dari total jumlah program studi yang ada (15.365). Sementara kemajuan pembangunan membutuhkan kualifikasi tenaga kerja yang semakin tinggi sehingga kebutuhan akan pendidikan tinggi terus meningkat tajam.

Mengantisipasi kondisi di atas, PNL kedepan (pada pengembangan periode II) secara signifikan perlu membuka program studi-program studi unggulan yang relevan dan sesuai kebutuhan pasar kerja (*job markets*). Dengan melihat statistik perkembangan program studi PNL sejak mulai dibuka (tahun 1987) dari 3 program studi sampai saat ini sudah mencapai 17 program studi, maka kebijakan pengembangan program studi akan ditingkatkan sebanyak 20 % untuk setiap periode pengembangan (setiap kurun waktu 5 tahun). Perluasan akses bidang pendidikan ini tidak saja dipandang dari sisi kuantitas, namun tetap mempertahankan kualitas melalui relevansi dengan merevisi kurikulum dan silabus. Konsekuensi dari rencana pengembangan tersebut, PNL memerlukan tambahan; lahan, sarana dan prasarana baik fisik maupun laboratorium, tenaga pendidik dan kependidikan.

Target dan harapan terhadap hasil yang ingin dicapai pada periode II ini sebagai berikut:

- PNL dengan program-program pendidikan dan program kerjasama lainnya yang ditawarkan dapat menjadi salah satu institusi pendidikan tinggi yang menjadi pilihan masyarakat (unggul);
- PNL dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan keterampilan tinggi (*employability skill*) agar siap mengisi pasar kerja serta memiliki kemampuan berwira usaha.

Sebagai indikator kunci keberhasilannya, pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan PNL harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- Terpenuhinya tambahan lahan minimal 25 Ha sampai berakhirnya masa RIP ini;
- Terpenuhinya tambahan luas bangunan fungsional minimal 14 m² / mahasiswa;
- Terpenuhinya ratio dosen dan mahasiswa minimal 1 : 8;
- Terselenggaranya pembukaan program studi baru, program pendidikan profesi dan sertifikasi, minimal 60 % dari target yang direncanakan dalam RIP ini;
- Terselenggaranya program magister terapan dan pendidikan jarak jauh, minimal 1 prodi untuk setiap jurusan yang ada sekarang;
- Terbentuknya pusat unggulan teknologi seperti; TUK, incubator bisnis, Laboratorium riset, laboratorium pengembangan produksi, dan *Institutional Supporting System* lainnya.



Berikut ini Program pengembangan yang akan dilaksanakan pada periode II ini baik bersifat layanan internal maupun eksternal PNL, dibagi pada 3 bidang yaitu; (1) bidang penyelenggaraan tridarma, (2) bidang kerjasama, dan (3) program afiliasi lainnya.

4.2.1. Program Kebijakan Penyelenggaraan Tridarma

Program kebijakan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, dikaitkan dengan salah satu pilar dari Renstra pendidikan nasional yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, disamping tetap menjaga mutu, relevansi dan daya saing, serta dengan memperhatikan keberlanjutan program yang sudah dilaksanakan PNL sampai saat ini. Sementara pengembangan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat akan terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan program pembangunan nasional dan tuntutan global. Mengikuti perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir terus tumbuh dengan cukup signifikan, dimana pada tahun 1998 jumlah mahasiswa sekitar 3,4 juta orang, pada akhir tahun 2006 jumlah mahasiswa di Indonesia sudah lebih 4,5 juta orang. Meskipun pertumbuhan partisipasi pendidikan tinggi terus meningkat, namun secara relatif APK pendidikan tinggi di Indonesia (18 %) masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangga. Disisi lain rendahnya jumlah publikasi ilmiah secara internasional, jumlah paten dan kekayaan intelektual lainnya, serta masih tingginya angka lulusan yang menganggur merupakan tantangan tersendiri bagi PNL untuk melakukan reorientasi dan reposisi dalam merencanakan pengembangannya kedepan. Program-program yang akan dikembangkan pada bidang ini, tentunya akan diikuti oleh pemenuhan sumberdaya lainnya (terutama sarana dan prasarana) yang akan dijabarkan pada matrik program kegiatan dalam penyusunan RIP ini.

a. Bidang Pendidikan

- ♦ **Penambahan program studi baru dan penguatan program studi yang ada.** Jumlah program studi baru yang akan dibuka disesuaikan dengan kebutuhan pasar, baik dari sisi kebutuhan pembangunan daerah, nasional dan tuntutan pasar global. Sesuai dengan konsep MP3EI, pengembangan program studi baru lebih diarahkan pada bidang energi dan migas untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja kedepan, mengingat koridor ekonomi wilayah sumatera yang salah satunya adalah sebagai lumbung energi nasional. Program studi baru dimaksud terdiri dari program Diploma (D1, D2, D3, dan D4), program magister terapan, dan program pendidikan jarak jauh dengan memperkuat basis ICT dan *inherent*. Dari program studi program studi yang ada sekarang dapat juga dikembangkan menjadi Jurusan yang nantinya akan melahirkan beberapa program studi baru.

Untuk penguatan program studi yang sudah ada dapat dilakukan peningkatan pelayanan pada proses PBM melalui penggunaan fasilitas multimedia, E-learning serta merancang kurikulum yang holistik, dimana proses pendidikan tidak hanya menekankan pada kecerdasan intelektual (IQ), tetapi juga kecerdasan emosional (EQ) dan spritual (SQ) secara harmonis tanpa mengurangi keterampilan pokok pada bidang keilmuan masing-masing. Penerapan inovasi metode pembelajaran berbasis produksi, terutama pada kegiatan praktikum diarahkan pada produk-produk nyata bernilai ekonomis serta menerapkan "*pendidikan berwawasan ekonomi*", dengan memberikan kesempatan

kepada mahasiswa untuk pengembangan diri dan berperilaku secara benar dalam berkarya. Disamping itu untuk memasuki era perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) kompetensi lulusan harus memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mensintesis, kemampuan untuk memanfaatkan peluang dengan keberanian mengambil resiko yang diperhitungkan (*entrepreneurial spirit*). Kedepan diperlukan perubahan pengembangan budaya *entrepreneurial* di PNL.

- ◆ **Peningkatan Kualitas Input, Proses dan Output.** Optimasi kuantitas input calon mahasiswa untuk menaikkan ratio penerimaan dalam upaya meningkatkan mutu mahasiswa baru, disamping efektifitas pelaksanaan melalui jalur undangan (USMP) serta sosialisasi (promosi) PNL yang lebih intens. Peningkatan kualitas proses pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi untuk semua program studi, perlu secara kreatif mengembangkan konsep-konsep baru melalui pembaharuan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dengan menempatkan mahasiswa sebagai subyek (*Student Centered Learning*) atau lebih dikenal metode *SCL*. Juga memberikan ruang dan hak otonomi kepada jurusan atau program studi untuk mengembangkan diri baik kedalam maupun keluar dalam pencapaian tujuan kurikulum pendidikan. Mutu lulusan sebagai output dari PNL perlu ditingkatkan melalui pembentukan tim kurikulum yang setiap saat mengevaluasi dan merevisi kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar, serta mempersyaratkan setiap lulusan harus memiliki nilai Toefl minimal 500. Konsep pendidikan juga perlu dikembangkan semangat kewirausahaan dan peningkatan *soft skills* (komunikasi, etika, *problem solving*, *critical thinking*, *team work*, dll), sehingga setiap lulusan akan mempunyai karakter percaya diri yang tinggi dan jiwa kepemimpinan yang kuat.
- ◆ **Pengembangan Kompetensi Dosen.** Meningkatkan kompetensi dosen melalui kegiatan ilmiah seperti menghadiri seminar, *conference*, pelatihan dan magang. Untuk PNL perlu dilakukan *mapping* yang jelas terhadap bidang-bidang pelatihan yang diikuti, disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum dan bidang keahlian masing-masing. Disamping itu perlu terciptanya suasana akademik yang mendorong proses penelitian, inovasi, kreatifitas dan pemunculan ide-ide bagi setiap individu dengan memanfaatkan kampus secara keseluruhan sebagai wahana pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi dosen juga ditingkatkan melalui studi lanjut program S2 dan S3 yang linear dengan bidang keahlian, serta up-grade tenaga dosen untuk persiapan pembukaan pendidikan profesi.
- ◆ **Pengembangan dan Peningkatan Aktifitas Instruksional (P2AI).** Unit yang sudah terbentuk di PNL merupakan salah satu indikator capaian kualitas pendidikan, kedepan akan dikembangkan menjadi suatu kegiatan yang berbasis produk berupa peningkatan terbitan buku teks, buku ajar, modul ajar, job sheet praktikum, alat peraga, alat bantu multimedia dengan tetap memperhatikan kualitas terbitan serta mengoptimalkan penggunaannya. Pada unit P2AI perlu dibentuk bidang perencanaan, evaluasi dan penelitian aktifitas instruksional dalam PBM, termasuk menyiapkan tenaga konseling, disamping terus meningkatkan program pelatihan dosen muda, pelatihan PEKERTI dan *Applied Approach* (AA). Selanjutnya perlu pengembangan program *E-learning* untuk menambah wawasan mahasiswa dalam pemanfaatan ICT.



-
- ♦ **Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu.** Politeknik Negeri Lhokseumawe saat ini telah memiliki Unit Jaminan Mutu (UJM) dan MONEV sebagai suatu indikator kesehatan organisasi dan kinerja akademik. Keberadaan unit ini akan ditingkatkan melalui pengembangan gugus kendali mutu, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi serta pengembangan Evaluasi diri di PNL yang pada akhirnya akan memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Disamping itu perlu dilakukan pelatihan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), dan pendampingan akreditasi untuk setiap program studi dan laboratorium yang ada di lingkungan PNL. Kedepan perlu dipersiapkan *Institutional Supporting System* berupa pusat pelatihan, penguatan *Carrier Development Center* (CDC), pusat jasa ketenagakerjaan (*Job placement center*), serta unit *Assesment* yang mengkaji kinerja pegawai, jenjang karir dan promosi jabatan untuk kesehatan organisasi.
 - ♦ **Pengembangan Layanan Laboratorium dan Bengkel.** Program ke depan, laboratorium dan bengkel tidak lagi sebagai penunjang tetapi harus lebih produktif sebagai pusat riset terapan yang punya nilai komersial yang dapat dimanfaatkan oleh *stake holders*. Sambil mempertahankan relevansi pendidikan, latihan pengembangan keterampilan harus menghasilkan produk-produk yang layak jual (dari *practical based learning* menjadi *production based learning*) dan bahkan dapat melayani produk-produk pesanan dari pihak luar. Untuk laboratorium yang memiliki *profit centre* diupayakan untuk segera disertifikasi. Disamping itu untuk peningkatan layanan juga perlu dilakukan penggunaan fasilitas laboratorium bersama (*common facilities*) sebagai kerjasama antar perguruan tinggi terutama untuk riset-riset unggulan.
 - ♦ **Pengembangan Layanan Perpustakaan dan Laboratorium Bahasa.** Dalam upaya mendorong minat baca dan kemampuan berbahasa inggris akan ditingkatkan pengadaan buku-buku berkualitas, jurnal ilmiah terakreditasi baik didalam maupun luar negeri, E-journal dan mengupayakan layanan berbasis elektronik serta peningkatan pelayanannya. Laboratorium bahasa secara terus menerus melakukan pelatihan bahasa dan secara berkala mengadakan test toefl. Kedepan perpustakaan dan laboratorium bahasa tidak lagi difungsikan sebagai unsur penunjang, tetapi akan diperluas sebagai *resource centre* seperti pengembangan *culturpreneurship*, *technopreneurship*, *entrepreneurship*, bedah buku, seminar-seminar, dan sebagainya.
 - ♦ **Pengembangan kualitas Program Studi.** Menjalankan sistem Manajemen Mutu Terpadu (MMT) sesuai SOP. Peningkatan pelayanan pada proses belajar mengajar (PBM) melalui penggunaan fasilitas multimedia, penerapan E-learning, penerapan kurikulum berbasis kompetensi dengan merevisi kurikulum secara terus menerus untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta relevan dengan kebutuhan pasar dengan memberi muatan *soft skill* pada proses PBM. Memperkuat sistem databased layanan akademik yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh mahasiswa. Penerapan inovasi metode pembelajaran berbasis produksi, terutama pada kegiatan praktikum diarahkan pada produk-produk nyata bernilai ekonomis (*pendidikan berwawasan ekonomi*) serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk pengembangan diri dan berperilaku secara benar dalam berkarya. Disamping itu program akreditasi

dimantapkan melalui pendampingan akreditasi bekerjasama dengan UJM agar semua program studi terakreditasi dengan peringkat A.

b. Bidang Penelitian

- ◆ **Bentuk-bentuk Penelitian yang Dikembangkan.** Hasil penelitian perguruan tinggi sangat diharapkan mampu menggali dan mengolah kekayaan dan keragaman sumberdaya alam dan keunggulan lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai pendidikan pada jalur vokasi, PNL harus menjadi pelopor di bidang penelitian terapan yang dapat menghasilkan teknologi tepat guna dan ekonomi bisnis yang dapat diterapkan di masyarakat dengan sasaran akhir yang ingin dicapai adalah perolehan HKI (paten). Disamping itu perlu juga dikembangkan penelitian interdisipliner berupa riset unggulan strategis yang membantu program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, mitigasi bencana alam dan mengatasi berbagai krisis lainnya serta tidak melupakan bentuk penelitian yang mempunyai implikasi langsung terhadap mutu pendidikan terutama dalam pengayaan materi ajar. Saat ini layanan kegiatan penelitian di PNL masih setingkat UPT dan ke depan akan ditingkatkan menjadi pusat penelitian dengan terus mengintensifkan pelatihan-pelatihan bagi dosen muda.
- ◆ **Pengembangan Kerjasama Penelitian.** Salah satu tujuan kerjasama ini adalah untuk mengatasi keterbatasan dana penelitian yang dapat diakses oleh para peneliti, disamping peran proaktif PNL dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan keunggulan daerah. Jaringan kerjasama penelitian perlu terus dikembangkan, tidak hanya antar lembaga pendidikan tetapi dengan pemerintah dan mitra strategis lainnya seperti industri, dunia usaha, serta kelompok masyarakat lain yang memerlukan lembaga riset. Kemitraan dengan lembaga penelitian luar negeri perlu ditindak lanjuti untuk menghasilkan dan mengolah sumberdaya alam secara lestari, dan PNL perlu memberi kesempatan kepada para individu yang melakukan pengembangan jaringan kerjasama ini dengan misi yang jelas.
- ◆ **Pengembangan Jumlah dan Mutu Penelitian.** Perlu diatur kebijakan dan regulasi di tingkat lembaga PNL, bahwa penelitian yang berkaitan dengan kuantitas lebih ditujukan kepada dosen muda terutama dana yang bersumber dari DIPA, yaitu berkaitan dengan mata kuliah yang diampu sebagai pendukung proses pembelajaran. Sedangkan yang berkaitan dengan mutu lebih diarahkan pada kompetisi tingkat nasional untuk dosen yang jabatan akademik lektor keatas terutama dalam bentuk HKI, riset-riset unggulan dan publikasi melalui jurnal ilmiah terakreditasi, *proceedings*, atau karya ilmiah lainnya ditingkat nasional dan internasional. Untuk PNL sendiri perlu segera diterbitkan journal terakreditasi serta terus mendorong stafnya melakukan penelitian-penelitian.
- ◆ **Pembentukan *Research Group*.** Optimalisasi kapabilitas para dosen difokuskan pada bidang kajian keahlian tertentu dengan membentuk laboratorium dan grup riset yang beranggotakan beberapa dosen dan mahasiswa. Keikutsertaan mahasiswa pada penelitian ini merupakan pembelajaran yang sangat efektif disamping biaya pendidikan menjadi efisien terutama bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Proposal penelitian mengacu pada payung strategis nasional dan dapat diajukan kepada



pihak luar untuk memperoleh pendanaan, seperti Kementrian Riset dan Teknologi, Kementrian Lingkungan Hidup, Toyota Foundation, dan lain sebagainya. Produk dari hasil penelitian ini dalam bentuk HKI (paten), buku, jurnal, karya ilmiah dan buku laporan tugas akhir/tesis mahasiswa untuk menghasilkan lulusan D3, D4 dan magister terapan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

- ♦ **Penerapan Hasil Penelitian.** Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan terutama produk penelitian terapan, dapat diaplikasikan kepada masyarakat dalam bentuk penerapan ipteks yang selama ini telah dilakukan oleh PNL melalui berbagai program studinya. Ke depan kegiatan seperti ini akan ditingkatkan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha dan kalangan industri dalam bentuk pemanfaatan dana *community development* untuk pemberdayaan masyarakat.
- ♦ **Pemberdayaan Masyarakat.** Desa Jilêukat kecamatan Blang Mangat - Lhokseumawe yang selama ini dijadikan sebagai laboratorium masyarakat oleh para dosen, telah menjadi desa percontohan hasil binaan PNL. Kegiatan ini secara berkesinambungan akan ditingkatkan, terutama dalam memecahkan problem di masyarakat melalui pelatihan dan penerapan teknologi pada setiap aspek kehidupan termasuk *technopreneurship* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan melalui kerjasama dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta pihak lainnya, perlu diperluas pada seluruh strata masyarakat
- ♦ **Peningkatan Bentuk Pelayanan Kepada Masyarakat.** Lembaga PNL sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sumberdaya manusia dengan berbagai disiplin ilmu juga potensi yang dimiliki, sudah saatnya mempromosikan diri dan siap memberikan pelayanan kepada semua *stake holders* yang membutuhkannya. Bentuk-bentuk pelayanan yang dapat dikembangkan antara lain ikut terlibat dalam pemerintahan guna membangun kekuatan perekonomian daerah, mengembangkan pendidikan berkelanjutan (*continuing education*), pendampingan pada program Akademi Komunitas, pelayanan jasa laboratorium, dan berperan aktif pada semua bentuk kegiatan yang dikembangkan oleh DP2M Dikti, yakni Vucer, program pengembangan budaya kewirausahaan (KWU, KKU, INWUB), usaha jasa dan industri (UJI) serta kemitraan lainnya dalam bentuk Iptek Bagi Masyarakat (IBM), dan Iptek Bagi Wilayah (IBW).

d. Kemahasiswaan dan Alumni

Mahasiswa sebagai salah satu komponen sivitas akademika PNL yang memiliki karakteristik bersifat heterogen, kedudukan dan fungsinya sangat strategis untuk dibina dan ditingkatkan daya kreativitasnya agar menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Program pengembangan kemahasiswaan diarahkan untuk dapat menghasilkan mahasiswa yang cerdas, bertanggung jawab, dan beretika sesuai dengan visi-misi PNL. Beberapa program pengembangan bidang kemahasiswaan, termasuk kegiatan co.kurikuler dan ekstra kurikuler dapat disusun sebagai berikut:



-
- ♦ Membangun budaya ilmiah melalui program kreatifitas mahasiswa
 - ♦ Menata kelembagaan kemahasiswaan secara sehat
 - ♦ Membina akhlak dan etika serta penerapan syariat islam di lingkungan kampus
 - ♦ Pengembangan program beasiswa
 - ♦ Membangun *culturpreneurship, entrepreneurship, dan entrepreneurial spirit*
 - ♦ Mengadakan pelatihan dan lomba karya ilmiah
 - ♦ Mengembangkan bidang minat dan bakat melalui UKM-UKM
 - ♦ Mengadakan pelatihan manajemen dan kepemimpinan (*leadership*) bagi mahasiswa
 - ♦ Melakukan studi comparative
 - ♦ Meningkatkan fasilitas mahasiswa, *student center*, akses internet dan asrama mahasiswa
 - ♦ Membekali alumni dalam mempersiapkan diri memasuki pasar kerja melalui try out, pelatihan dan test potensi akademik melalui Pusat Jasa Ketenagakerjaan (PJK) yang dibentuk PNL.
 - ♦ Melakukan *tracer study* secara intensif untuk mengakses informasi alumni
 - ♦ Mengikutsertakan peran alumni sebagai basis almamater untuk membesarkan PNL dengan cara sumbang pemikiran dan bantuan lainnya
 - ♦ Merekrut alumni lulusan terbaik menjadi tenaga administrasi atau teknisi sebagai *sense of belonging* dan loyalitas dapat tumbuh dengan baik.

4.2.2. Program Kebijakan Bidang Kerjasama

Arah pengembangan bidang kerjasama difokuskan pada pemanfaatan sumberdaya yang ada pada PNL secara luas baik untuk kepentingan pendidikan maupun layanan kepada masyarakat pengguna (*stake holders*). PNL perlu secara proaktif melakukan *benchmarking* dan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan pihak lain termasuk juga dengan perguruan tinggi lain. Kerjasama dimaksud dapat meliputi “ *bidang akademik maupun non-akademik* “, yang diarahkan pada penggalan potensi bersama atau peningkatan efisiensi. Menyadari bahwa masing-masing perguruan tinggi memiliki kekuatan sumber daya yang berbeda, maka kerjasama dapat diarahkan untuk pengembangan program bersama yang unggul berdasarkan pada kekuatan sumber daya masingmasing. Pendekatan yang sama dapat dilakukan dalam mengembangkan kemitraan antara perguruan tinggi dengan lembaga pemerintah, industri dan dunia usaha (*triparteit*). Untuk keperluan itu, PNL perlu mengembangkan sistem informasi dan komunikasi tentang sumberdaya yang dimiliki serta berbagai peluang kerjasama, termasuk promosi keberagaman kultural, sehingga dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak.

a. Bidang Akademik

- ♦ **Kerjasama antar Perguruan Tinggi.** Bentuk lain dari kerjasama antar perguruan tinggi dapat dilakukan dalam konteks pembinaan oleh pihak yang lebih mapan terhadap pihak yang memerlukannya. PNL dapat merancang kerjasama semacam ini melalui kemitraan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Strategi pengembangan kerjasama akademik dapat dilakukan melalui berbagai bentuk program, antara lain: *Sharing*

resources; Program kembaran; Pertukaran dosen dan mahasiswa; pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya dan fasilitas (*common facilities*), terutama untuk lab.riset; penerbitan bersama karya ilmiah; kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat; pelatihan keahlian tertentu yang dibutuhkan; penyelenggaraan seminar bersama, diseminasi ipteks dan lain-lain. Kerjasama bidang ini dapat juga dilakukan melalui pengiriman tenaga dosen yang sudah berpengalaman untuk membina perguruan tinggi baru, serta memberi pendampingan pada pendirian perguruan tinggi baru seperti Akademi Komunitas.

- ◆ **Pembukaan program sertifikasi.** Sertifikasi sebagai salah satu bentuk jaminan mutu kompetensi seseorang semestinya menjadi tanggung jawab organisasi profesi. Namun demikian, PNL dengan segala sumberdaya yang dimiliki dapat membuka program sertifikasi melalui kerjasama yang erat dengan asosiasi profesi. Jenis program sertifikasi yang dikembangkan disesuaikan dengan fasilitas dan tenaga pendidik/instruktur yang ada serta harus memperoleh pengakuan oleh pihak pengguna (*user*) seperti industri atau dunia usaha lainnya, baik ditingkat nasional maupun internasional. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi merupakan kebutuhan bersama antara pihak asosiasi profesi sebagai penyandang legitimasi pemberian sertifikat, industri sebagai pengguna dan pihak yang memberikan pengakuan terhadap sertifikat tersebut, serta perguruan tinggi sebagai pengemban mutu keahlian yang dicakup oleh sistem sertifikasi tersebut. Bentuk kegiatan lainnya pada bidang ini, PNL dapat membuka Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk semua program studi yang ada minimal satu per program studi. Hal lain yang dapat dilakukan PNL adalah memberi pelatihan dan sertifikasi kepada guru-guru SMK untuk memenuhi tingkat kompetensi guru terhadap bidang ilmu yang diampunya.
- ◆ **Program pendidikan berkelanjutan.** Dalam rangka meningkatkan akses bagi masyarakat, PNL dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran; termasuk dalam mengembangkan model pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) atau pendidikan sepanjang hayat (*long life learning*) baik bergelar maupun non gelar dengan model pembelajaran yang fleksibel. Model-model pendidikan di atas dapat dikembangkan oleh PNL bersama pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dunia usaha, asosiasi profesi, serta pemerintah. Dengan pengalaman dan kemampuan yang memadai dapat mengembangkan model-model pendidikan jarak jauh (*distance learning*), baik berupa kursus singkat (*short course*), atau kurikulum sistem modul (*modular curriculum*) atau sistem lainnya. Dalam kaitan dengan globalisasi dan kualitas hasil kegiatan ini, maka pada saatnya semua bentuk pendidikan berkelanjutan ini harus menuju pada sertifikasi mutu secara internasional.
- ◆ **Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.** Kebijakan pengembangan pendidikan tinggi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pembangunan di daerah dan dimasa depan, PNL dan pemerintah daerah harus berperan secara pro-aktif dan partisipatif untuk menciptakan sinergi dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah. Keterkaitan antara PNL dan pemerintah daerah dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, pendidikan tinggi dapat berperan menunjang upaya pemerintah daerah dalam pengembangan berbagai sektor pembangunan daerah, terutama sektor-sektor ekonomi, sosial, dan budaya



dengan menyiapkan lulusan sesuai yang dibutuhkan. Dalam hal ini, tentunya dengan memperhatikan prioritas kebutuhan dan potensi unggulan daerah. Pada sisi yang lain, pemerintah daerah dapat berperan menunjang pengembangan pendidikan tinggi, khususnya kegiatan perguruan tinggi dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemberian beasiswa, bantuan peralatan, dan pengembangan staf pengajar lainnya. Bentuk kerjasama lainnya dapat dilakukan melalui pelatihan bidang tertentu pada dinas-dinas terkait, penyediaan iptek bagi pembangunan daerah, dan lain-lain. Keberhasilan pembangunan daerah diberbagai sektor akan meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengatasi masalah-masalah nasional, dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing bangsa di tingkat internasional. Dalam rangka menuju daya saing global, PNL juga dapat memainkan peranannya dengan melibatkan diri pada kerjasama antar pemerintah dalam mekanisme *Government to Governmen (G to G)*. Terwujudnya sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi melalui berbagai program kerjasama juga diharapkan memiliki legitimasi atau didukung oleh masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

- ♦ **Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri.** Sektor industri adalah pihak yang sangat berkepentingan dengan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta sebagai penyedia sumber daya manusia terdidik yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan usaha, maka seyogyanya kemitraan tersebut akan saling menguntungkan kedua belah pihak. PNL ke depan dengan menerapkan pendidikan berwawasan ekonomi sangat berpeluang bermitra dengan industri dan dunia usaha, dimana sambil menjaga tingkat relevansi pendidikan untuk semua jenis latihan pengembangan keterampilan harus menghasilkan produk-produk yang layak jual atau bahkan merupakan produk-produk pesanan dari industri. Produk standar yang dikembangkan untuk praktek keterampilan tingkat dasar, sedangkan produk pesanan dimanfaatkan untuk pengembangan keterampilan tingkat lanjut. Prinsip-prinsip tepat waktu, unggul mutu dan sadar biaya diterapkan secara ketat dalam proses pembelajaran, mengingat keterkaitannya dengan pihak eksternal. Dengan demikian para mahasiswa mengembangkan keterampilannya dengan memanfaatkan produk-produk nyata dan bernilai ekonomis serta belajar berperilaku secara benar dalam berkarya. Di dalam sistem pembelajaran ini seorang dosen bisa berfungsi ganda, disamping memberikan kuliah ataupun instruksi dalam praktikum, seorang dosen juga melakukan penyeliaan terhadap proses pengerjaan produk oleh mahasiswa di dalam kerangka praktikum. Akhirnya sumberdaya yang dimiliki termanfaatkan secara efisien untuk menghasilkan lulusan yang berketerampilan tinggi pada bidangnya dan produk-produk yang bernilai ekonomis layak jual sebagai hasil dari latihan-latihan dalam rangka praktikum pengembangan keterampilan mahasiswa. Materi pembelajaran selalu ter-update, karena baik dosen maupun mahasiswa menggunakan obyek-obyek nyata dalam proses pembelajarannya, yang mana sebagian besar merupakan pesanan dari industri. Kerjasama lainnya dapat dilakukan dengan menempatkan mahasiswa praktek pada industri atau sebaliknya dengan menempatkan masyarakat industri sebagai mitra dalam pelaksanaan pendidikan tinggi (teaching industri), dan penyeleggaraan berbagai macam pendidikan/pelatihan untuk penyegaran tenaga kerja industri.

b. Bidang Non Akademik

Sebagai jalur pendidikan vokasi, PNL dengan segala sumberdaya terutama peralatan yang dimiliki secara terus menerus dapat memperluas akses layanan melalui kerjasama non akademik dengan berbagai pihak. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang kebijakan iptek Indonesia, secara lugas mengulas tentang perlunya kelembagaan dan jaringan kerjasama antar lembaga iptek. Strategi untuk mengembangkan kerjasama non-akademik ini dapat dilakukan antara lain berupa: kontrak manajemen/kerja, pendayagunaan asset, jasa dan royalti paten, komersialisasi hasil penelitian serta usaha penggalangan dana lainnya. Dibawah bidang kerjasama, PNL perlu membentuk unit-unit kerja baik dalam bentuk; pusat unggulan teknologi (*center of technology*), komite usaha jasa inovasi, dan pusat kepakaran lainnya.

- ♦ **Pembentukan Pusat Unggulan Teknologi.** Pengembangan iptek untuk ekonomi berbasis pengetahuan diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek dalam rangka mendukung daya saing secara global. Dalam hal ini, PNL perlu membentuk Pusat-pusat keunggulan teknologi (*center of technology*) melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa, pusat incubator bisnis, pengembangan lembaga penelitian yang handal, perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil pertemuan dan hak atas kekayaan intelektual (HaKI), pengembangan dan penerapan standar mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana iptek. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama antar unit kerja didalam PNL sendiri mengingat kecenderungan pemecahan masalah saat ini yang menghendaki lintas disiplin bidang keilmuan. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan, serta pengembangan kelembagaan sebagai keterkaitan dan fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha.
- ♦ **Pembentukan Komite Usaha Jasa Inovasi-Iptek (UJI-Iptek).** Penyediaan pelayanan pendidikan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Usaha jasa inovasi ini perlu dibentuk dengan pertimbangan bahwa PNL memiliki laboratorium, workshop, hasil-hasil penelitian terapan, para dosen sebagai kelompok ide (*think-thank*) dapat menjadi potensi yang luar biasa, dimana berbagai bakat intelektual diikat dengan tujuan untuk bisa mengkomersialisasikan teknologi baru, transfer teknologi dan penerapan iptek ke pasar, atau mempercepat proses inovasi ke implementasi secara nyata. Laju inovasi teknologi semakin pesat karena dorongan dari dua sisi yaitu; dari permintaan dan pasokan. Dari sisi permintaan muncul karena adanya persaingan global yang semakin tajam, sedangkan dari sisi pasokan disebabkan oleh adanya terobosan-terobosan baru inovasi di berbagai bidang. PNL memahami akan hal ini, maka tindak lanjut dari pengembangan ini adalah dengan menyiapkan unit-unit jasa dan produksi untuk menawarkan serta membangun networking dengan para *stake holders* baik ditingkat daerah maupun nasional bahkan internasional.
- ♦ **Pembentukan Pusat studi Terapan Komunitas Energi Terbarukan (KomET).** Untuk menyelaraskan dengan salah satu konsep MP3EI, dimana koridor Sumatera sebagai

lambung energi nasional, maka sangatlah tepat PNL sejak sekarang mengantisipasi tantangan kedepan dengan membentuk KomET ini sebagai bentuk kepedulian sivitas akademika PNL terhadap permasalahan energi nasional umumnya dan energi provinsi Aceh khususnya. Pemerintah melalui Perpres Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional telah menginstruksikan agar secara bertahap energy mix nasional yang saat ini masih didominasi oleh energi yang berasal dari minyak bumi, diubah menjadi energy alternative lainnya yang didalamnya memasukkan Energi Terbarukan (ET) sebanyak 17 % pada tahun 2024. Angka ini oleh banyak kalangan masih dianggap terlalu kecil sehingga kemudian diubah menjadi 25 % melalui visi 2024 yang dicanangkan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) pada tahun 2009 lalu. Tidak ada yang tidak mungkin untuk pengembangan energi terbarukan yang aman dan bersih, karena Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan potensi sumberdaya air, angin, matahari dan tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif cukup tersedia. Pusat studi terapan KomET ini dapat dikembangkan dalam bentuk; studi dan penelitian energi, pusat informasi dan kajian-kajian ilmiah di bidang energi, melakukan kegiatan penyebaran (*diseminasi*) dan promosi energi berkelanjutan, tempat berkumpulnya civitas akademika PNL untuk turut memberi kontribusi penyelamatan bumi, pemanfaatan dan pengembangan energi khususnya di Provinsi Aceh, dan membangun jaringan kerja dengan intitusi regional, nasional maupun internasional guna menghimpun kekuatan dalam pengendalian dan pemanfaatan energy fosil serta pengembangan energi terbarukan.

4.2.3. Program Affiliasi lainnya

Disamping kerjasama-kerjasama di atas, dalam konteks perluasan akses layanan PNL juga diharapkan untuk mengeksplorasi peluang-peluang donasi dari masyarakat ataupun bentuk-bentuk usaha (*venture*) yang dapat menghasilkan dana untuk meningkatkan PNBP lembaga. Namun demikian, seperti halnya dengan bentuk-bentuk kerjasama, peluang-peluang ini hanya akan dapat diterima sepanjang tidak mengorbankan nilai dan norma-norma akademik. Untuk itu PNL perlu dilengkapi dengan sistem pengawasan internal yang dapat memantau dan membuat pelaporan tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan yang berjalan. Program afiliasi ini merupakan keterkaitan dengan program kerjasama, dimana kalau ada hal-hal yang belum termasuk pada program kerjasama, seiring dengan perkembangan dan tuntutan pasar akan dilayani melalui program afiliasi ini.

4.3. Arah Pengembangan PNL Periode III

Daya saing global (2020-2024)

Membangun generasi profesional memiliki peran dalam mempertahankan sumber daya alam dan energi untuk membawa kesejahteraan bagi manusia. Pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan kemitraan antara pendidikan, pelatihan profesional dan industri. Periode ini adalah periode lanjutan yang lebih menekankan kepada peningkatan aspek kualitas semua program kerja yang sudah dilaksanakan pada periode-periode sebelumnya dengan mengacu (*benchmarking*) ke standar regional Asia, Asia Pasifik, atau regional lainnya. Dalam periode ini,



prioritas diberikan kepada upaya “mempertahankan” (*to maintain*) kualitas yang sudah diraih dan “meningkatkan” (*to enhance*) ke level yang lebih luas, yaitu kawasan regional.

Dalam rangka persaingan global, kebijakan dalam bidang pendidikan tinggi harus dapat merespon berbagai tantangan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Pada saat ini terlihat bahwa sebagian besar lulusan perguruan tinggi Indonesia masih belum mampu untuk bersaing mengisi lapangan kerja pada tingkat internasional. Sementara itu, berbagai perubahan mendasar dan sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan tinggi, yaitu krisis multi dimensi, perubahan rezim pemerintahan, dan trend global. Hal ini berakibat di satu pihak terjadi perubahan stratifikasi sosial yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan pendidikan tinggi dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas, di lain pihak terbatasnya kemampuan pemerintah untuk mendanai pendidikan tinggi.

Globalisasi juga mendorong berkembangnya demokratisasi dan pembentukan masyarakat madani (*civil society*) yang semakin terbuka. Di Indonesia, hal tersebut ditandai dengan perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik menuju sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistik. Sebagaimana halnya dengan setiap perubahan, transformasi masyarakat Indonesia menuju masyarakat madani yang demokratis dapat menimbulkan masalah yang mengarah pada disintegrasi dan ketidakpercayaan masyarakat pada sistem yang berjalan. Supremasi hukum yang sedang dibangun belum juga berhasil menata masyarakat madani yang dicitacitakan. Dalam situasi yang demikian, masyarakat pada umumnya menggantungkan harapan pada perguruan tinggi untuk memberikan panduan bagi perjalanan bangsa selanjutnya. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus mampu memberikan contoh atau inspirasi bagi pembentukan dan pengembangan masyarakat madani tersebut.

Demokratisasi yang semakin berkembang di Indonesia memberikan peluang perguruan tinggi untuk lebih berperan dalam mempercepat terbentuknya masyarakat madani. Namun demikian, perguruan tinggi tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengembangan SDM, penelitian yang kontekstual, dan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat harus dikembangkan.

4.3.1 Kualitas dan Relevansi

Tingkat persaingan sumber daya manusia (SDM) di pasar kerja nasional maupun internasional terus meningkat seiring dengan peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi baru pada berbagai bidang dunia usaha, serta kebutuhan tingkat profesionalisme (*knowledge, hard skills, soft skills*) yang semakin tinggi. Usaha peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi di Indonesia berbeda dengan masa sebelumnya karena pasar terbuka (*open market*) telah menyebabkan penetrasi tenaga kerja dari luar negeri akan semakin besar, sehingga persaingan di tingkat nasional tidak lagi terjadi hanya antar lulusan perguruan tinggi nasional saja, melainkan juga antar lulusan perguruan tinggi nasional dengan lulusan perguruan tinggi dari luar negeri. Kompetisi pencari kerja dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang semakin ketat menuntut perhatian penyelenggara pendidikan tinggi untuk selalu melakukan penyesuaian kurikulum, proses dan materi pembelajaran terhadap perkembangan dunia kerja. Peningkatan relevansi pendidikan ini sebaiknya menjadi sasaran dari peningkatan kualitas yang

terus menerus (*continuous quality enhancement*) sebagai bagian dari suatu sistem penjaminan mutu (*quality assurance system*) perguruan tinggi secara keseluruhan.

4.3.2 Internasionalisasi Program Akademik

Internasionalisasi sebagai dampak dari globalisasi perlu diantisipasi oleh pemerintah dan perguruan tinggi secara tepat dan cepat, dalam memahami perbedaan ukuran, standar dan acuan kinerja pendidikan tinggi. Berbagai alternatif yang bisa dilakukan antara lain mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi asing, mengusahakan pengakuan internasional melalui akreditasi dan sertifikasi, serta mengadopsi standar internasional dalam pembelajaran tanpa meninggalkan kepentingan nasional.

Beroperasinya perguruan tinggi asing di Indonesia merupakan tantangan yang nyata bagi pendidikan tinggi Indonesia. Keadaan ini menuntut peningkatan kualitas, reputasi serta kredibilitas perguruan tinggi nasional di mata masyarakat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, perguruan tinggi Indonesia diharapkan mampu menerapkan model pengelolaan pendidikan untuk dapat menciptakan daya tarik bagi calon mahasiswa, domestik dan luar negeri, serta menghasilkan lulusan dengan standar kualitas internasional. Perkembangan teknologi informasi membuka cakrawala baru pengembangan model pembelajaran yang memungkinkan perguruan tinggi dapat menjangkau berbagai penjuru dunia melalui pendidikan jarak jauh. Bentuk antisipasi lain terhadap beroperasinya perguruan tinggi asing, perguruan tinggi Indonesia perlu mengembangkan program kembar (*twinning program*). Akan tetapi untuk mewaspadai beroperasinya perguruan tinggi asing yang kurang berkualitas maka perguruan tinggi Indonesia harus dapat mengevaluasi kualitas mitra program kembarannya.

Persaingan antar perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional juga merupakan tantangan yang harus dihadapi pendidikan tinggi Indonesia. Di sisi lain, kerjasama antar institusi merupakan peluang yang harus dikembangkan. Meskipun masing-masing perguruan tinggi dapat mengembangkan keunggulan (*niche*) atau karakter spesifiknya, melalui kerjasama saling-menguntungkan kekuatan masing-masing dapat disinergikan sedangkan kelemahan masing-masing dapat diatasi. Interaksi dan komunikasi antar institusi dalam persaingan yang sehat, dan kerjasama yang saling memberi manfaat, merupakan strategi yang harus terus dikembangkan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan internasionalisasi.

4.3.3 Persaingan Kualitas global.

Kualitas luaran pendidikan tinggi dinyatakan sebagai daya saing luaran tersebut dalam memperoleh pengakuan dunia ilmu pengetahuan di tingkat internasional. Kualitas ini antara lain ditandai dengan kemampuan untuk menembus publikasi di jurnal internasional, kemampuan lulusan untuk bersaing di arena global, dan kemampuan untuk memenangkan penghargaan akademik di tingkat internasional seperti hadiah Nobel, dan lain-lain. Relevansi, di pihak lain mengukur tingkat kesesuaian antara produk yang dihasilkan pendidikan tinggi (baik berupa lulusan maupun hasil-hasil penelitian dan pengembangan) dengan kebutuhan pihak-pihak pengguna produk tersebut antara lain pemerintah, masyarakat, dan industri.



Program pendidikan tinggi yang relevan dan berkualitas ditandai dengan kemampuan lulusan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, menciptakan lapangan kerja baru, atau mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan pengetahuan global. kemampuan bersaing lulusan perguruan tinggi di Indonesia untuk merebut peluang-peluang pekerjaan di luar negeri pada umumnya masih rendah. Kemampuan bahasa Inggris merupakan salah satu kendala utama. Kendala lainnya adalah sertifikasi. Program pendidikan vokasi dan profesi di Indonesia umumnya tidak dilengkapi dengan pemberian sertifikat kecakapan profesi yang diakui secara internasional.

4.3.4 Riset kelas dunia berbasis keunggulan.

SASARAN:

1. Riset berbasis keunggulan ;
2. Keunggulan riset komparatif dan kooperatif;
3. Dana riset dari masyarakat Indonesia dan internasional;
4. Kemitraan dan Kolaborasi dengan pihak *Academic, Business, Community* dan *Government* (ABCG);
5. *User-relationship* (kerjasama dengan pengguna).

PROGRAM:

1. Merancang, menerapkan dan meningkatkan riset unggulan potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan pengguna;
2. Mengembangkan sumber daya riset dan keunggulan proses riset yang memiliki nilai tambah yang tinggi;
3. Memperluas jaringan kemitraan strategis untuk peningkatan pendanaan riset dari masyarakat;
4. Memperluas jaringan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan (*Stakeholders - ABCG*) untuk meningkatkan kualitas penelitian;
5. Meningkatkan raihan penghargaan riset (*research award*).

Pembelajaran berbasis riset didasari filosofi konstruktivisme yang mencakup 4 (empat) aspek yaitu: pembelajaran yang membangun pemahaman mahasiswa, pembelajaran dengan mengembangkan *prior knowledge*, pembelajaran yang merupakan proses interaksi sosial dan pembelajaran bermakna yang dicapai melalui pengalaman nyata. Pembelajaran berbasis riset merupakan metode pembelajaran yang menggunakan *authentic learning, problem-solving, cooperative learning, contextual (hands on & minds on, dan inquiry discovery approach* yang dipandu oleh filosofi konstruktivisme.

Pembelajaran berbasis riset (PBR) merupakan salah satu metode *student-centered learning* (SCL) yang mengintegrasikan riset di dalam proses pembelajaran. PBR bersifat multifaset yang mengacu kepada berbagai macam metode pembelajaran. PBR memberi peluang / kesempatan kepada mahasiswa untuk mencari informasi, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan atas data yang sudah tersusun; dalam aktivitas ini berlaku pembelajaran dengan pendekatan "*learning by doing*". Oleh karena itu, PBR membuka peluang bagi pengembangan metode pembelajaran, antara lain:



-
1. Pembaharuan pembelajaran (pengayaan kurikulum) dengan mengintegrasikan hasil riset,
 2. Partisipasi aktif mahasiswa di dalam pelaksanaan riset,
 3. Pembelajaran dengan menggunakan instrumen riset, dan
 4. Pengembangan konteks riset secara inklusif (mahasiswa mempelajari prosedur dan hasil riset untuk memahami seluk-beluk sintesis).

Memperkaya bahan ajar dengan hasil penelitian dosen

Pada proses pembelajaran ini hasil penelitian dosen digunakan untuk memperkaya bahan ajar. Dosen dapat memaparkan hasil penelitiannya sebagai contoh nyata dalam perkuliahan, yang diharapkan dapat berfungsi membantu peserta didik dalam memahami ide, konsep, dan teori penelitian. Dalam kegiatan ini nilai, etika, dan praktik penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu yang diajarkan dapat disampaikan untuk memberikan inspirasi kepada peserta didik. Bagi peserta didik pascasarjana dapat diterapkan diskusi yang komprehensif tentang penelitian yang sedang dikerjakan oleh dosen.

Menggunakan temuan-temuan penelitian mutakhir dan melacak sejarah ditemukannya perkembangan mutakhir tersebut

Temuan-temuan penelitian mutakhir yang diperoleh dari pustaka didiskusikan untuk mendukung materi pokok bahasan yang sesuai. Dinamika perkembangan ilmu pengetahuan disampaikan di dalam perkuliahan sebagai rangkaian sejarah perkembangan pengetahuan tersebut. Dengan demikian peserta didik dapat memiliki pemahaman bahwa kebijakan dan praktik yang ada pada saat ini, dapat dilakukan dan dikembangkan saat ini, karena adanya kebijakan dan praktik yang telah dikembangkan sebelumnya. Hal ini semua merupakan suatu kesatuan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan.

Memperkaya kegiatan pembelajaran dengan isu-isu penelitian kontemporer

Pada proses pembelajaran ini dapat dimulai dengan meminta peserta didik menyampaikan isu-isu penelitian yang ada pada saat ini, yang sesuai dengan pokok bahasan. Selanjutnya peserta didik diminta mendiskusikan penerapan isu penelitian tersebut untuk penyelesaian problem nyata dalam kehidupan. Strategi ini dapat diperkaya dengan berbagai cara misalnya:

- 1) Dengan membandingkan laporan hasil penelitian dan laporan pemberitaan yang terjadi di masyarakat.
- 2) Melakukan analisis tentang metodologi penelitian serta argumentasi yang berkaitan dengan temuan penelitian tersebut yang dikemukakan dalam jurnal penelitian.
- 3) Melakukan studi literatur tentang perkembangan pengetahuan terkini yang sesuai dengan pokok bahasan.

Mengajarkan materi metodologi penelitian di dalam proses pembelajaran

- a. Meningkatkan pemahaman tentang metodologi penelitian.
- b. Merancang materi ajar dengan menyertakan metodologi penelitian pada pokok bahasan tersebut, sehingga dapat menerapkannya untuk menyelesaikan problem penelitian yang nyata.
- c. Merancang materi ajar dengan berbagai metodologi penelitian yang berkaitan dengan beberapa isu penelitian mutakhir, sehingga dapat belajar melakukan evaluasi terhadap isu penelitian tersebut.



Pembelajaran dengan kegiatan penelitian dalam skala kecil

Pada proses pembelajaran ini, kelompok peserta didik diberi tugas melakukan penelitian bersama. Dengan demikian peserta didik dapat meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dari kegiatan tersebut. Dengan kegiatan ini budaya penelitian dapat lebih terbangun dibandingkan dengan bila penelitian tersebut diselenggarakan secara individual.

Memperkaya proses pembelajaran dengan budaya penelitian

Pada strategi ini diusahakan agar peneliti merasa sebagai bagian dari budaya penelitian di bagian atau fakultas yang bersangkutan. Dalam rangka itu maka beberapa hal dapat dilakukan:

- a. Memberikan informasi pada peneliti tentang kegiatan penelitian dan keunggulan penelitian dosen di jurusan atau fakultas yang bersangkutan.
- b. Mengadakan kuliah umum oleh pakar atau staf dari institusi lain, untuk menyampaikan capaian penelitiannya sebagai referensi langsung bagi peneliti.
- c. Mendorong peneliti untuk berpartisipasi pada kegiatan seminar penelitian baik sebagai peserta, penyaji makalah, ataupun sebagai penyelenggara seminar tersebut.

Memperkaya proses pembelajaran dengan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh peneliti

Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh peneliti seharusnya perlu dipahami oleh peserta didik. Nilai-nilai tersebut antara lain: objektivitas, penghargaan akan temuan penelitian, respek pada pandangan lain, toleransi terhadap ketidakpastian, dan kemampuan analisis. Penyampaian nilai-nilai tersebut dapat dilakukan dengan:

- a. Mencerminkan nilai-nilai seorang peneliti dalam interaksi kelas.
- b. Menyampaikan proses perjalanan seorang peneliti sebelum pekerjaannya dipublikasi termasuk beberapa kali revisi yang dilakukan.
- c. Memberikan pemaparan terstruktur yang menginspirasi peserta didik tentang beberapa nilai misalnya: menyampaikan artikel penelitian yang mengandung argumentasi yang berbeda pada topik yang sama kemudian menanyakan peserta didik tentang validitasnya serta menyampaikan kesimpulan.

Model-model strategi implementasi PBR tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan disiplin ilmu dan perkembangan budaya penelitian yang telah berkembang di institusi yang bersangkutan dan peneliti memiliki karakter serta nilai-nilai yang sifatnya universal.

4.3.5 Budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia

SASARAN :

1. Keunikan dan klasifikasi nilai budaya lokal;
2. Politeknik sebagai pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya lokal melalui berbagai kegiatan.

PROGRAM :

1. Menginventarisasi, mengukur dan melaksanakan riset budaya lokal;
2. Mengembangkan inovasi dan komersialisasi atraksi budaya;
3. Menyelenggarakan berbagai *event* dan penganugerahan (*award*) tentang kebudayaan Aceh, baik di Politeknik, nasional, maupun internasional.

BAB 5

POLA PENDANAAN

5.1 Pendanaan

Dalam mencapai keberhasilannya Politeknik Negeri Lhokseumawe terus melakukan peningkatan dan mengembangkan visi dan misi yang telah dicanangkan. Seiring dengan pengembangan yang direncanakan tidak terlepas dari pendanaannya dalam melakukan berbagai kegiatan. Sumber pendanaan dalam melakukan kegiatan bersumber dari subsidi pemerintah dalam bentuk anggaran eks pembangunan, anggaran rutin dan dana masyarakat. Adapun sumber pendanaan PNL terdiri dari:

1. DIPA yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja batuan sosial.
2. PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang meliputi penerimaan SPP mahasiswa Hibang Bersaing, pendapatan sewa/jasa dan penerimaan lain.
3. Bantuan Pemda TK I dan TK II (APB Aceh)
4. BKS (kerjasama)

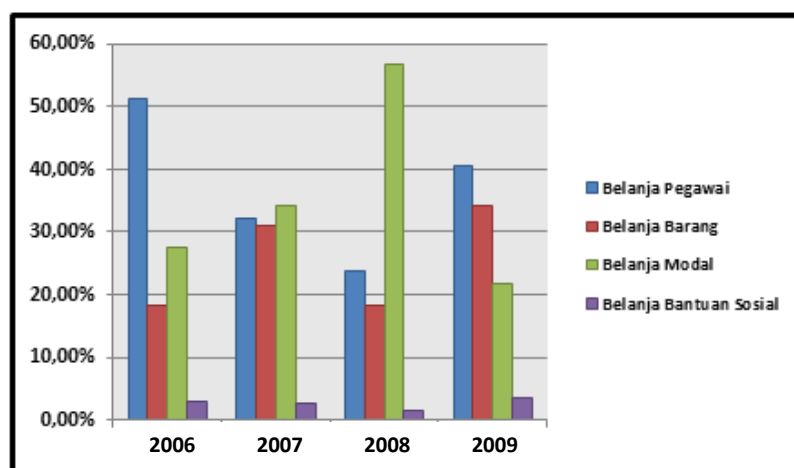
Penggunaan Alokasi Dana yang terealisasi sampai saat ini ditunjukkan pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 Alokasi Pendanaan

Sumber Dana	Tahun			
	2006	2007	2008	2009
Eks Proyek	13.493.423.000	30.218.854.000	-	
Rutin	18.344.212.000	24.283.676.000	84.085.906.000	50.083.854.000
PNBP	2.503.045.000	3.603.143.000	5.167.961.000	4.981.898.000

Alokasi anggaran tahun 2006 dan tahun 2007 masih memisahkan antara anggaran yang berasal dari eks proyek dengan anggaran rutin. Selanjutnya pada tahun 2007-2008 anggaran eks pembangunan menjadi bagian dari anggaran rutin. Anggaran eks pembangunan mencakupi program: Pemerataan dan perluasan PT, Peningkatan mutu relevansi dan daya saing, Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan yang diperoleh dari dana DIPA.

Alokasi anggaran rutin di fungsikan untuk kegiatan pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan serta penyelenggaraan operasional. Anggaran rutin direalisasikan dalam bentuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Anggaran rutin yang meningkat pada tahun 2009. Dalam realisasi dana belanja modal pada tahun 2009 diserap untuk pembangunan gedung kuliah, auditorium, rehab ruang bengkel dan auditorium.



Gambar 5.1 Alokasi Anggaran
(Sumber : PSI, 2009)

Alokasi dana pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari dana masyarakat meliputi uang kuliah (SPP) mahasiswa, pendapatan sewa/jasa. Perolehan dana terbesar dari penerimaan uang SPP mahasiswa.

5.2 Rencana Pengembangan Pendanaan

Dalam mencapai pengembangan institusi PNL masih bersumber pada pendanaan rutin dari pemerintahan. Pengembangan untuk mewujudkan 3 program utama yaitu (1) Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan, (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing, dan (3) Penguatan tata kelola, pencitraan publik dan akuntabilitas. Sumber pendanaan berasal dari anggaran dana rutin yang bersumber dari DIPA. Pendanaan lain masih bersumber dari PBNP dan APB Aceh. Alokasi dana dianggarkan untuk operasional, pegawai, gaji, honorarium, belanja barang dan belanja modal. Proyeksi pendanaan yang dianggarkan dalam setiap 5 tahun (renstra) dapat disesuaikan.

- Proyeksi pendanaan tahun 2010-2014

Tabel 5.2 Pendanaan tahun 2010-2014

Sumber Dana	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Rutin	99,755,028,000	130,611,441,470	136,658,989,760	142,706,538,050	148,754,086,340
PBNP	6,012,863,000	7,335,764,030	7,776,731,040	8,217,698,050	8,658,665,060
Jumlah	105,767,891,000	137,947,205,500	144,435,720,800	150,924,236,100	157,412,751,400

Sumber : hasil proyeksi, 2009



- Proyeksi pendanaan tahun 2015-2019

Tabel 5.3 Pendanaan tahun 2015-2019

Sumber Dana	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rutin	154,801,634,630	157,292,841,694	159,911,737,470	162,665,225,702	165,560,641,526
PBNP	9,099,632,070	9,612,035,736	10,209,498,410	10,906,139,888	11,718,423,851
Jumlah	163,901,266,700	166,904,877,430	170,121,235,880	173,571,365,590	177,279,065,377

Sumber : hasil proyeksi, 2009

- Proyeksi pendanaan tahun 2020-2024

Tabel 5.4 Pendanaan tahun 2020-2024

Sumber Dana	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rutin	168,605,787,347	171,808,972,896	175,179,060,042	178,725,513,091	182,458,455,354
PBNP	12,665,546,952	13,769,892,488	15,057,559,384	16,558,978,983	18,309,634,236
Jumlah	181,271,334,300	185,578,865,385	190,236,619,426	195,284,492,074	200,768,089,590

Sumber : hasil proyeksi, 2009



BAB 6

SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam konteks desentralisasi pendidikan, yang ditempuh melalui proses perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan pendidikan di tingkat Universitas dan satuan pendidikan di bawahnya. Proses ini sebagai upaya pemberdayaan sekaligus peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat/tim Pemantauan dan evaluasi di berbagai tingkatan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga desentralisasi pendidikan di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe dapat dilaksanakan dengan baik. Pemantauan dan evaluasi merupakan suatu perangkat yang menjunjung nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kegiatan-kegiatan bermutu yang dapat membantu dalam melaksanakan kegiatan di Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP). Sistem ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam RIP dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program pendidikan yang dilaksanakan secara periode/berkala. Jangkauan periode telah direncanakan berdasarkan periode jangka panjang 2010 – 2024.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh unit yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan evaluasi. Untuk maksud tersebut maka peran Unit Jamin Mutu (UJM) PNL sangat penting dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. UJM adalah pelaksana tingkat institusi untuk memberikan penjaminan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*), bahwa Politeknik Negeri Lhokseumawe memenuhi dan menjalankan manajemen mutu secara konsisten sesuai dengan standar yang telah disepakati dan ditetapkan.

6.1 Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum di bidang pendidikan atau peraturan lainnya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
dan
- (4) Berbagai peraturan perundangan terkait lainnya.

Selain merujuk pada berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada, perlu juga mempertimbangkan beberapa draft Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah seperti Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Pendidikan Nasional.

6.2 Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi; 2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; 3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan handal; 4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka; 5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif; 6) pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal; 7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi; 8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; 9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; 10) berbasis indikator kinerja, yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan program strategis PNL; 11) efektif dan efisien.

6.3 Sistematika Pamantauan Dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan rutin yang dapat dilakukan secara berjenjang, terstruktur dan terjadwal yang dilakukan oleh Tim khusus. Tim khusus dibentuk berdasarkan SK Direktur PNL dengan kriteria tertentu. Evaluasi hasil menunjukkan perlunya dilakukan salah satu dari tiga jenis transformasi *retooling*, revitalisasi atau *rediction*. Penyempurnaan Instrumen (*retooling*) dilakukan ketika penelaahan terhadap hasil yang dicapai organisasi menemukan bahwa infrastruktur dan gaya kepemimpinan menjadi kunci utama. Revitalisasi dilakukan apabila strategi dan tata nilai organisasi perlu untuk ditinjau ulang agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. *Rediction* hanya dilakukan apabila dianggap keberadaan organisasi perlu dikaji lebih lanjut. Ketiga tahapan ini merupakan tingkatan dalam melakukan organisasi.

6.4 Mekanisme pelaksanaan

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup aspek: 1) pemerataan dan perluasan akses; 2) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; 3) tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara eksternal oleh pemerintahan baik DEPDIKNAS maupun badan lain seperti BAN-PT, dan lainnya. Sementara itu, pemantauan secara internal dilakukan oleh Senat Politeknik Negeri Lhokseumawe.

6.4.1 Pemanantauan dan Evaluasi Eksternal

Pemantauan dan evaluasi eksternal dilakukan oleh Pemerintah (Inspektur Jendral Depdiknas). Sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Dalam konteks pemerintah, pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk menggali masukan, data, dan informasi yang dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan nasional. Kebijakan nasional itu terutama yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Pengembangan dan penetapan acuan nasional untuk penyusunan kurikulum;
- Pengembangan dan perumusan standarisasi mutu dan relevansi pendidikan;
- Pengembangan dan pelaksanaan pemerataan serta perluasan kesempatan memperoleh pendidikan;



-
- Peningkatan daya saing keluaran pendidikan di tingkat regional maupun internasional;
 - Pengembangan dan perumusan kebijakan mekanisme pemantauan dan evaluasi;
 - Pemberian masukan bagi Pemda tentang kelebihan dan kekurangan dalam implementasi kebijakan nasional.
 - Peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparat daerah dalam menjabarkan kegiatan
 - Pemda dan satuan pendidikan dapat melaksanakan rencana strategis selama lima tahun ke depan dan mampu mengelola program secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan produktif;
 - Penyusunan anggaran pendidikan yang memihak pada orang miskin dan satuan pendidikan. Untuk itu, pemerintah berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi atas anggaran yang berasal dari APBN yang berbentuk dana alokasi khusus (DAK), dana tugas pembantuan (DTP), dan dana dekonsentrasi (Dekon);
 - Perwujudan aparatur pemerintah, pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang bebas dari KKN, yang ditandai oleh menurunnya jumlah kasus KKN yang terjadi; dan
 - Peningkatan citra publik pemerintah Indonesia terutama dalam bidang pendidikan.

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai acuan bagi BAN-PT dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi lainnya untuk menilai kinerja Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam melaksanakan standarisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil belajar tingkat nasional.

6.4.2 Pemantauan dan Evaluasi Internal

Kegiatan pemantauan dan evaluasi internal merupakan salah satu bentuk sistem penjaminan mutu internal yang diselenggarakan oleh suatu organisasi. Kegiatan pemantauan dan evaluasi internal diharapkan yang dilakukan oleh perguruan tinggi adalah merupakan kebutuhan organisasi, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban. Kegiatan tersebut seyogyanya dilaksanakan secara terprogram dengan prosedur yang jelas dan didukung oleh sumber daya yang kompeten.

Secara internal, Senat PNL diharapkan selalu menerima laporan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi dari unit terkait, seperti Sub Bagian pemantauan dan Evaluasi, Bagian Sistem Informasi melalui laporan berkala baik bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan, yang tertuang dalam Laporan Program Kerja Kegiatan yang bersifat bulanan yang mengevaluasi kinerja kegiatan dan anggaran berikut dengan output maupun outcomenya, Laporan Sistem Akuntansi Institusi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Semua itu merupakan masukan penting bagi PNL dalam menyusun laporan kinerja sebagai dasar kebijakan DEPDIKNAS.

Pemantauan dan evaluasi internal PNL dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang berbasis pada program dan kegiatan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menilai prestasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Indikator utama yang diukur disini adalah indikator dari kepentingan *stakeholders* yang dituju.



6.5 Indikator Kinerja

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja satuan organisasi pengelola dan penyelenggara pendidikan yang mencakup aspek teknis, administrasi dan pengelolaan kegiatan dan/atau program pendidikan. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada hakekatnya untuk mengukur kesesuaian pencapaian indikator kinerja atau target kerja yang ditetapkan. Mengingat bidang pendidikan mempunyai program pembangunan pendidikan yang beragam, maka indikator kinerja utama yang diukur antara lain : APK, Waktu Tunggu mendapatkan pekerjaan, Masa studi, IPK, Jurusan terakreditasi A (%), Dosen S3 (%), Jumlah guru besar, Persentase Keketatan (%), Ratio mahasiswa luar Aceh, Ratio mhs asal dari daerah terpencil, Ratio mahasiswa asing, Ratio mahasiswa *disadvantage*, Publikasi Jurnal Internasional (%), total anggaran kegiatan penelitian, total anggaran kegiatan pengabdian, Paten/HAKI, Award Nasional, Award Internasional, Buku ditulis dosen, dan Total Income. Berdasarkan sifat dari masing-masing jenis indikator kinerja maka diperlukan cara dan alat ukur yang berbeda sesuai dengan sifat dan bentuk indikator yang akan diukur.

MATRIKS RENCANA INDUK PENGEMBANGAN POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE PERIODE 2010 – 2024

PERIODE PENGEMBANGAN	2010 – 2014	2015 – 2019	2020 – 2024
PROGRAM PENGEMBANGAN	PENGUATAN KAPASITAS LEMBAGA	PERLUASAN AKSES LAYANAN	DAYA SAING GLOBAL
1	2	3	4
Pemantapan Tata Kelola	<p>1. Aktualisasi Penataan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Kelembagaan di dalam lingkungan PNL.</p> <p>a. Menata kembali Tugas pokok, fungsi dan Kewenangan setiap unit kerja sesuai kebutuhan dan dinamika kondisi untuk memperlancar tugas-tugas, untuk mencapai visi dan misi PNL (meliputi penataan Struktur Organisasi baku, kewenangan, SOP baku, dll.)</p> <p>b. Penataan Dokumen Tupoksi, SOP</p> <p>c. Penambahan Kelembagaan baru jika diperlukan.</p> <p>2. Menjalankan Manajemen Mutu.</p> <p>Pada tahun 2013 PNL secara sungguh-sungguh menjalankan manajemen mutu secara kongkrit; yaitu menjalankan prinsip-prinsip siklus manajemen sebagai langkah persiapan menuju perubahan kondisi PNL sekarang ini. Yaitu dalam kaitannya dengan Perencanaan (<i>Planning</i>), Pelaksanaan (<i>Do</i>), Pengawasan (<i>Check</i>), Tindakan Perbaikan Kondisi (<i>Action</i>), pada pelayanan administrasi secara umum (pada administrasi PNL), dan pelayanan proses belajar mengajar (pada seluruh jurusan dan prodi).</p> <p>3. Penataan Tupoksi dan Jenjang Karier untuk Tenaga Penunjang Pendidikan.</p>	<p>1. Pemantapan penerapan tugas pokok dan fungsi pada setiap unit kerja, sesuai SOP.</p> <p>2. Peningkatan penerapan manajemen mutu terpadu pada setiap unit kerja dan persiapan menuju standar ISO 9002 (<i>Improvement quality manajemen</i>) dengan melengkapi item-item yang dipersyaratkan.</p> <p>3. Pengembangan peta jabatan, jenjang karir tenaga penunjang pendidikan</p>	<p>1. Sistem pelayanan prima, berkualitas dengan waktu tunggu yang pendek.</p> <p>2. Penguatan penerapan standar ISO 9002 bidang manajemen dan pengelolannya sesuai tuntutan pasar global.</p> <p>3. Peningkatan layanan tenaga penunjang pendidikan yang sesuai dengan</p>

<p>Membangun Sistem Informasi dan Data Terpadu</p>	<p>Program peralihan tenaga teknis fungsional umum menjadi tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) menjadi prioritas tahun pertama (2013) pada tahap pertama. PLP sebagai tenaga penunjang pendidikan merupakan partner penting bagi tenaga pendidik (dosen) dalam mengemban tugas-tugas tridharma perguruan tinggi dalam dunia pendidikan tinggi.</p> <p>Pada tahun 2016 PNL harus sudah menyelesaikan sistem informasi dan data terpadu secara online yang dapat meningkatkan komunikasi, kinerja dan citra manajemen PNL secara keseluruhan. Kegiatan membangun sistem informasi dan data terpadu meliputi pada perluasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Pangkalan Data Terpadu (PNL, Jurusan) yang dapat mendukung EPSBED. 2. Peningkatan pelayanan belajar mengajar melalui intranet, internet; 3. Web Site PNL, Jurusan, Laboratorium. 4. Adanya terbitan Kampus. 5. Radio Kampus 	<p>(teknisi, analis dan pustakawan) melalui pelatihan bidang masing-masing, untuk meningkatkan kompetensi sesuai SKKNI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upgrade infrastruktur ICT sesuai dengan perkembangan. • Peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) bidang akademik, kepegawaian dan keuangan secara online. 	<p>tuntutan pasar global.</p> <p>Peningkatan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi sistem manajemen perguruan tinggi bertaraf internasional.</p>
<p>Meningkatkan Kualitas Lembaga dan SDM PNL</p>	<p>Program peningkatan kualitas diarahkan pada program pencapaian hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akreditasi lembaga (Institusi, Jurusan, Program Studi, Laboratorium) 2. Peningkatan jumlah dosen bersertifikat pengajar profesional. 3. Peningkatan jumlah dosen bersertifikat keahlian dibidangnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Upgrade akreditasi program studi dan lembaga PNL oleh lembaga audt eksternal (BAN PT) minimal B dan target A pada akhir periode II. • Upgrade sertifikasi laboratorium, dosen dan tenaga penunjang pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Upgrade akreditasi program studi dan lembaga PNL oleh lembaga audt eksternal bertaraf internasional (ABET). • Mengusahakan pengakuan internasional melalui akreditasi dan sertifikasi

<p>Penataan Pengelolaan Fasilitas Kampus dan Perluasan Area</p>	<p>Penataan Pengelolaan Fasilitas Kampus didasarkan kepada peningkatan fungsi dan pengaruhnya terhadap kelancaran proses belajar mengajar dan kenyamanan atmosfer akademik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Air bersih, Sanitasi dan Kebersihan <ul style="list-style-type: none"> • Air bersih untuk laboratorium, air bersih untuk hunian (asrama dan Perumahan), air bersih untuk kamar mandi/WC perkantoran. • Saluran buangan • Kebersihan kampus; tempat pembuangan sampah, kerjasama dengan dinas kebersihan. 2. Ruang Kuliah, Ruang Kuliah serba guna 3. Internet Kampus 4. Keamanan Kampus 5. Pencegahan Pemadam Kebakaran 6. Sarana Jalan 7. Perawatan Perumahan dinas 8. Sarana Olah Raga 9. Tempat Parkir 10. Fasilitas Kantin, fotocopy dan alat tulis, untuk mahasiswa di dalam kampus yang memadai. 11. Pengelolaan Asrama Mahasiswa. 12. Sarana Tempat Ibadah/ mesjid kampus 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian dan penataan kembali master plan kampus PNL dan membutuhkan tambahan lahan (kampus 2) sebesar 15 Ha pada periode ini. • Peningkatan pengelolaan fasilitas kampus sesuai item 1 s/d 12 pada periode I 	<p>Penataan kampus 1 dan 2 dan tambahan lahan kampus 10 Ha lagi dengan total lahan kampus pada akhir periode ini sebesar 40 Ha, sehingga PNL menjadi kampus percontohan dan menuju kampus wisata bertaraf internasional.</p>
<p>Meningkatkan Sarana dan Prasarana</p>	<p>Untuk mempersiapkan reorientasi dan reposisi peranan PNL maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung, oleh karenanya perlu penambahan fasilitas pendukung sesuai kebutuhan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Perpustakaan (Peningkatan jumlah buku dan judul buku: eBook, Journal) 2. Fasilitas Laboratorium (Lab. Riset dan Laboratorium untuk Pelatihan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan sarana dan prasarana pendukung yang signifikan disesuaikan dengan peningkatan daya tampung dan penambahan program studi. • Pembangunan gedung baru untuk ruang kuliah, laboratorium, studio dan pusat bahasa, perpustakaan, beserta fasilitas pendukungnya. 	<p>Peningkatan sarana dan prasarana, serta pembangunan gedung baru dan fasilitas pendukung yang representatif dan bertaraf internasional.</p>

<p>Program Kebijakan Penyelenggaraan Tridarma</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitas Laboratorium Bahasa 4. Fasilitas Ruang Kuliah 5. Ruang Pameran 6. Pusat Kajian dan Pengembangan Program Study baru 7. Pusat Kajian dan Konsultasi Teknologi Unggulan 8. Fasilitas Alat Bantu Proses Belajar Mengajar 9. Fasilitas Internet <p>a. Bidang Pendidikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan program studi baru dan penguatan program studi yang ada. <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan program studi baru minimal 1 PS per jurusan. - Pembukaan program S2 Magister Terapan - Persiapan pembukaan kelas internasional minimal 1 per jurusan. - Rancangan kurikulum yang holistik dan sesuai pasar kerja (KKNI) - Penataan PBM melalui sistem multi media berbasis e-learning. - Persiapan Penerapan pendidikan berwawasan ekonomi. • Peningkatan Kualitas Input, Proses dan Output. <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur undangan (USMP). - Sosialisasi (promosi) PNL secara intens. - Jadwal seleksi masuk PNL dilakukan lebih awal dari Perguruan Tinggi lain. - Penataan dan penambahan laboratorium dan peralatan sesuai kurikulum. - Penataan kurikulum berbasis kompetensi untuk semua program studi. - Mengembangkan konsep baru dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan program studi baru pada bidang energy, dan kemaritiman. <ul style="list-style-type: none"> - Tambahan pembukaan jurusan dan PS baru yang signifikan (2 PS per jurusan). - Pemantapan program S2 dan persiapan pembukaan S3 (Doktor terapan) - Pilot project pembukaan kelas internasional. - Pengembangan kurikulum yang terus menerus sesuai tuntutan pasar. - Pemantapan proses PBM berbasis e-learning dan penerapan ICT. - Penerapan pendidikan berwawasan ekonomi (<i>production based learning</i>) - Optimasi kuantitas input calon mahasiswa untuk menaikkan ratio penerimaan. - Memperketat seleksi masuk dengan menaikkan passing grade. - Peningkatan kegiatan promosi untuk perekrutan mahasiswa lokal, nasional dan internasional. - Penerapan kurikulum baru berbasis KKNI. - Memberi ruang dan hak otonomi kepada 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan program studi baru sesuai tuntutan pasar global. <ul style="list-style-type: none"> - Tambahan pembukaan program studi baru yang relevan (2 PS per jurusan). - Pembukaan Program S3 (Doktor terapan) - PBM dari ruang kelas ke di manapun dan kapan saja. - Pergeseran dari kertas ke “on line”. - Kurikulum yang fleksibel dengan e-education dan tele-education. - Pengembangan program kembar (<i>twinning program</i>). - Penerapan pendidikan dengan mengintegrasikan hasil riset menjadi produk. - Peningkatan kegiatan promosi PNL untuk perekrutan calon mahasiswa baru yang berkualitas (lokal, nasional, regional, dan internasional). - Pemantapan metode SCL dan fleksibilitas proses PBM sesuai tuntutan global. - Peningkatan keterampilan profesionalisme mahasiswa (<i>soft skills</i>) untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, etika, <i>problem solving</i>, <i>critical thinking</i>, dan
--	--	---	--

	<p>metode SCL (<i>Student Centered Learning</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempersyaratkan setiap lulusan memiliki nilai toefl minimal 500. <p>• Pengembangan Kompetensi Dosen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti kegiatan ilmiah seperti seminar, pelatihan dan magang. - Studi lanjut dari program S2 ke program S3 yang linear sesuai bidang. - Pengembangan program sertifikasi dan kompetensi staf dan teknisi. - Persiapan tenaga pendidik untuk pembukaan program sertifikasi, <i>short course</i> melalui bidang kerjasama. <p>• Pengembangan Aktifitas Instruksional (P2AI).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan buku teks, buku ajar, modul ajar, job sheet praktikum. - Pengadaan alat peraga dan alat bantu multi media. - Meningkatkan pelatihan bagi dosen muda, pekeria dan <i>Applied approach</i>. - Evaluasi dan studi banding aktifitas instruksional pada proses PBM. - Penyediaan tenaga konseling bagi mahasiswa yang bermasalah. - Pengembangan <i>teaching learning center</i> yang berbasis ICT dan inovasi pembelajaran dengan <i>e-learning</i>. <p>• Pengembangan Sisten Penjaminan Mutu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh unit jaminan mutu (UJM) PNL terutama pada proses belajar mengajar (PBM) untuk menjaga mutu kinerja akademik. - Pengembangan gugus kendali mutu. - Melakukan pelatihan audit mutu 	<p>jurusan dan prodi untuk mengembangkan diri baik kedalam maupun keluar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan materi kewirausahaan dan <i>technopreneurship</i> untuk menumbuhkan karakter percaya diri dan jiwa kepemimpinan yang kuat bagi lulusan. <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan magang pada bidang khusus sesuai keahlian. - Peningkatan jumlah dosen yang mengikuti program S3 minimal 60 % dari jumlah dosen yang ada. - Pengajuan dosen yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi guru besar. <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan mutu terbitan buku teks, buku ajar, modul ajar, dan job sheet. - Upgrade alat peraga dan alat bantu multi media. - Peningkatan fasilitas infrastruktur ICT, hardware, dan software. - Pengembangan inovasi model pendidikan berkelanjutan (<i>continuing education</i>) dan belajar sepanjang hayat (<i>long life learning</i>) baik bergelar maupun non gelar yang lebih fleksibel. - Penguatan model pembelajaran e-learning berbasis ICT. <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan peran unit jaminan mutu (UJM) PNL dalam menjamin pencapaian mutu akademis. - Peningkatan sistem pengendalian dan pemantauan ketercapaian standar mutu akademik. 	<p><i>team work</i> yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan magang pada bidang-bidang khusus sesuai pasar global. - Pemantapan dosen S3 dan penambahan jumlah dosen mengikuti program S3 mencapai 75 % dari jumlah dosen. <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan model pembelajaran yang lebih fleksibel dengan teknologi informasi (e-education, tele-education, cyber-campus) baik bersifat <i>non interactive</i>, semi <i>interactive</i>, atau <i>fully interactive</i>. <ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan peran unit jaminan mutu (UJM) PNL dalam menjamin pencapaian mutu akademis. - Pemantapan sistem pengendalian dan pemantauan ketercapaian standar mutu
--	--	---	---

	<p>akademik internal (AMAI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan proses akreditasi untuk setiap program studi sesuai yang diinginkan oleh BAN PT untuk menaikkan peringkat akreditasi A. 		<p>nakademik.</p>
--	--	--	-------------------

